



Media Pemersatu Bangsa



**LAKIP**  
**LPP TVRI**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia serta ridho-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) tahun 2020 telah selesai disusun tepat pada waktunya dan merupakan laporan awal atau tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) LPP TVRI Periode 2020-2024.

Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja ini adalah upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya yang merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran LPP TVRI sesuai dengan tugas dan kewenangan serta merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Disamping itu, laporan ini juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di LPP TVRI.

Jakarta, 26 Februari 2021

**DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
(LPP TVRI)**

  
**IMAM BROTOSENO** *Imam Broto Seno*

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI) Tahun 2020 adalah Laporan kinerja tahun pertama dari Renstra periode Tahun 2020-2024 dan merupakan capaian kinerja LPP TVRI Tahun 2020 dan gambaran dari pencapaian seluruh unit kerja di LPP TVRI termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2020. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan: (i) Perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahun 2020 (ii) Capaian kinerja atas perencanaan dan pengendalian yang telah ditetapkan; serta (iii) Realisasi anggaran yang dicapai dari masing-masing program/kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2020 LPP TVRI telah mencapai realisasi atas target yang telah ditetapkan sebagaimana Tabel pencapaian kinerja TVRI Tahun 2020 dibawah ini.

Tabel Pencapaian Kinerja LPP TVRI Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	BOBOT CAPAIAN
Terwujudnya peningkatan pelayanan siaran TV public yang modern	Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik	1. <i>Audience Share/ rating</i>	1.7	1.43	84 %
		2. <i>Public Values</i>	3	3.60	120%
		3. <i>Public Participation</i>	0,6%	0.6%	100%
		4. Populasi yang terlayani penyiaran digital	78.3%	78.43%	0.13%
		5. <i>Share</i> Nilai Marketing terhadap Pendapatan	5.6%	204,9	188,5%
	Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan	1. Opini BPK	WTP	Masih Proses	Masih Proses
		2. Indeks RB	60	Masih Proses	Masih Proses
		3. Nilai SAKIP	60	Masih Proses	Masih Proses
		4 Jumlah Peningkatan PNBPN	132,2 M	Rp. 209,2 M	158 %

Sebagaimana Tabel pencapaian diatas, dari 2 Sasaran strategis, yaitu sasaran strategis pertama adalah meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik dengan 5 (lima) Indikator kinerja utama adalah indikator

1. *Audience Share/rating*
2. *Public Values*
3. *Public Participation*
4. Populasi yang terlayani penyiaran digital
5. *Share* Nilai Marketing terhadap Pendapatan

Secara umum capaian di indikator kinerja utama tersebut sudah dicapai dengan cukup baik dan dari ke 5 (lima) Indikator kinerja utama tersebut, untuk masing-masing indikator 2, 3, 4 dan 5 telah mencapai realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan indikator 1 capaian realisasinya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan capaian pada sasaran strategi kedua adalah meningkatnya kualitas manajemen internal dengan 4 (empat) indikator kinerja utama di tingkat Lembaga yaitu indikator

1. Opini BPK
2. Indeks RB
3. Nilai SAKIP
4. Jumlah Peningkatan PNB

Dari 4 (empat) Indikator tersebut, indikator 1 dan 4 telah tercapai realisasi sesuai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan indikator 2 dan 3 capaian realisasinya masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara umum seluruh indikator kinerja utama LPP TVRI sudah tercapai dengan cukup baik namun pencapaian tersebut masih ada capaian yang belum dicapai secara maksimal dan akan dilanjutkan untuk perencanaan kinerja berikutnya.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iman Brotoseno

Jabatan : Direktur Utama

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 4 Januari 2021

**Direktur Utama**  
  
**IMAN BROTOSENO**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iman Brotoseno

Jabatan : Direktur Utama LPP TVRI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pamungkas Trishadiatmoko

Jabatan : Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2021

Direktur Utama

IMAN BROTOSENO

Ketua Dewan Pengawas

PAMUNGKAS TRISHADIATMOKO



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
		2021
Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik	1. <i>Audience Share/rating</i>	2
	2. <i>Public Values</i>	3,1
	3. <i>Public Participation</i>	1,2%
	4. Populasi yang terlayani penyiaran digital	60%
	5. <i>Share Nilai Marketing terhadap Pendapatan</i>	11.7%
Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan	1. Opini BPK	WTP
	2. Indeks RB	70
	3. Indeks Layanan Publik	8.70
	4. Nilai SAKIP	70
	5. Zona Integritas	7 Unit kerja
	6. Jumlah Peningkatan PNBP	292,8 M

Program

1 Penyiaran Publik

2 Dukungan Manajemen

Pagu

1. Rp. 636.954.035.000

2. Rp. 821.258.888.000

Jakarta, 4 Januari 2021

**Direktur Utama**

**IMAN BROTOSENO**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
PERJANJIAN KINERJA.....	4
DAFTAR ISI .....	7
DAFTAR TABEL .....	8
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	9
BAB 1 PENDAHULUAN .....	10
1.1 Latar Belakang .....	10
1.2. Peran dan Tugas Fungsi LPP TVRI.....	11
1.3. Sumber Daya LPP TVRI .....	13
A. Sumber Daya Manusia.....	13
B. Sarana dan Prasarana.....	19
1.4. Rencana Program Tahun 2020 dan Pendanaannya.....	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	24
2.1. Perencanaan Strategis 2020-2024 .....	24
2.2. Penetapan Kinerja LPP TVRI Tahun 2020.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 Capaian Sasaran LPP TVRI Tahun 2020 .....	31
3.2 Analisis dan Evaluasi hasil capaian Kinerja Tahun 2020 .....	33
3.3 Realisasi anggaran LPP TVRI Tahun 2020 .....	64
BAB IV PENUTUP .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah SDM TVRI menurut usia Per 1 Mei 2020.

Tabel 1.2 Jumlah PNS TVRI Pensiun Tahun 2019-2023

Tabel 1.3. Jumlah PNS berdasarkan Golongan Per 1 Mei 2020

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 1 Mei 2020

Tabel 1.5. Jumlah Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pegawai (ABK)  
Pada Masing-masing Unit Kerja

Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.7. Aset Tanah

Tabel.1.8. Alokasi Per Program

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra LPP TVRI Tahun 2020-2024

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja LPP TVRI Tahun 2020

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja TVRI Tahun 2020

Tabel 3.2. *Share* Siaran TVRI Nasional Tahun 2014-2019 (Sumber data : *Nielsen*)

Tabel 3.3. Capaian SPIP Perbandingan tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1. Proses Bisnis (*Generic Value Chain*) LPP TVRI

Gambar 1.2. Struktur Organisasi LPP TVRI

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja LPP TVRI Tahun 2017-2019

Grafik 3.2. *Share* Siaran TVRI Nasional Tahun 2015-2019 (Sumber data : *Nielsen*)

Grafik 3.3. *Share* Siaran TVRI Daerah Tahun 2015-2019 di 11 kota (Sumber data : *Nielsen*)

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Laporan Kinerja tahunan Kementerian/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja tersebut disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran dan menjadi media pertanggungjawaban sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi secara terukur sesuai sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*.

“Televisi Republik Indonesia adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan merupakan Lembaga penyiaran publik yang mengemban tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi dengan skala nasional dan internasional untuk mendorong kemajuan kehidupan masyarakat. Sebagaimana tugas dan kewenangan dalam penyiaran televisi, LPP TVRI memuat *content* penyiaran TV yang meliputi informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan sehingga LPP TVRI sebagai Lembaga penyiaran publik menjadi sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan untuk menjaga identitas nasional (*flag carrier*), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional.

Dengan tugas dan kewenangan tersebut serta terus dinamisnya perubahan lingkungan strategis maka keberadaan TVRI semakin dibutuhkan secara nyata bagi

pemenuhan hak warga negara atas informasi, serta terus melestarikan dan memajukan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dalam memelihara kebhinekaan dan persatuan Indonesia. Dengan demikian, LPP TVRI sebagai peran Lembaga penyiaran publik akan semakin penting dan strategis dan bermakna untuk mendukung capaian tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, maka setiap tahun LPP TVRI wajib melaporkan capaian pelaksanaan kinerja tahunan berdasarkan target sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis (Renstra) LPP TVRI Tahun 2020-2024. Untuk itu, Tahun 2020 LPP TVRI yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024 akan menyampaikan laporan kinerja tahunan sesuai rencana perjanjian kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani. Dalam mewujudkan capaian pelaksanaan kinerja tahun 2020, LPP TVRI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan kewenangan, yang didukung oleh sumber daya serta rencana program dan pendanaannya. Adapun penjelasan pencapaian kinerja sesuai dengan peran dan kewenangan serta dukungan sumber daya dan rencana program pendanaannya adalah sebagai berikut

## **1.2. Peran dan Tugas Fungsi LPP TVRI**

Sebagaimana Peraturan pemerintah No 13 tahun 2005 pada pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, TVRI menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik
- b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya TVRI.
- d. Tugas-lain yang diberikan oleh Menteri terkait

Sebagaimana Tugas dan fungsi serta kewenangan LPP TVRI sebagai penyelenggara Televisi Publik memiliki proses bisnis (*Generic Value Chain*) yang meliputi kebijakan penyiaran TV publik, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan penyiaran televisi

publik serta pembinaan dan pelaksanaan administrasi dalam mendukung tugas-tugas penyiaran televisi publik sebagaimana pada proses bisnis (*Generic Value Chain*) LPP TVRI dibawah ini.

Gambar 1.1.

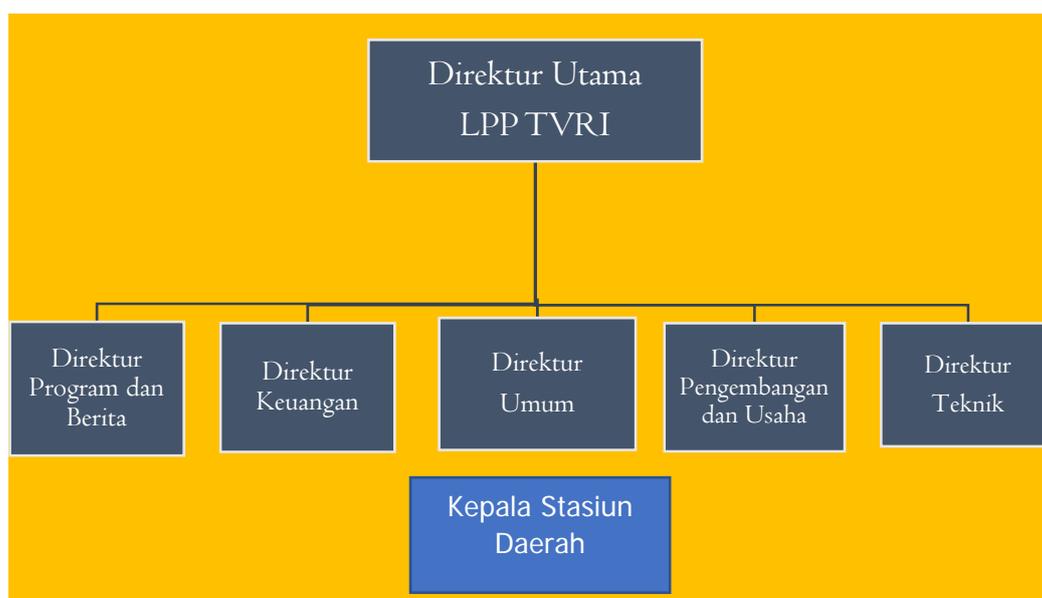
Proses Bisnis (*Generic Value Chain*) LPP TVRI



Adapun struktur organisasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2.

Struktur Organisasi LPP TVRI



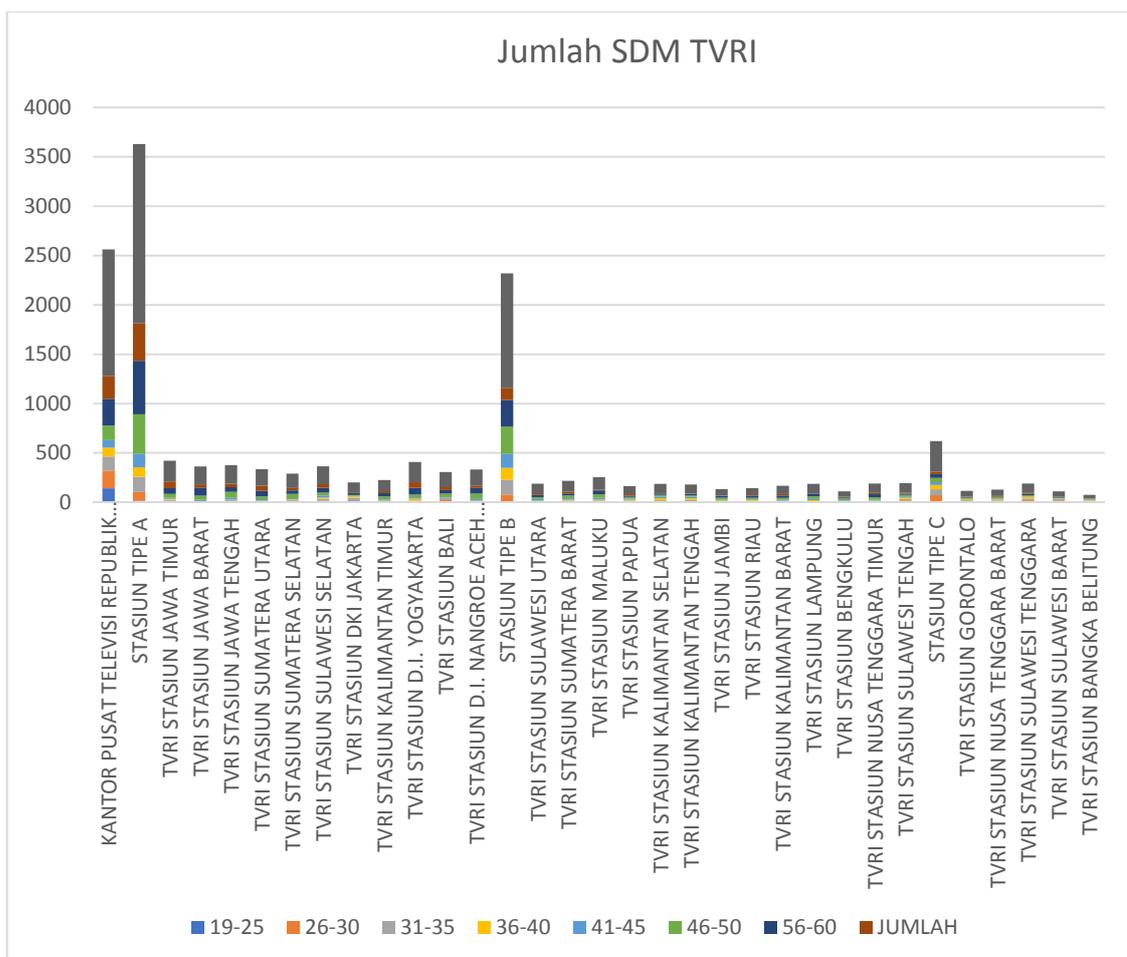
### 1.3. Sumber Daya LPP TVRI

#### A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, LPP TVRI didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

Jumlah SDM TVRI per 1 Januari 2020 sebanyak 4.566 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 3.101 orang atau 68 % dan PBPNS sebanyak 1.465 orang atau 32%. Jumlah SDM tersebut tersebar di Kantor Pusat sebanyak 1.261 orang dan TVRI Stasiun Penyiaran Tipe A sebanyak 1.815 orang, Stasiun Tipe B sebanyak 1.160 dan Stasiun Tipe C sebanyak 310 orang.

Gambar 1.3. Jumlah SDM TVRI menurut usia Per 1 Januari 2020.



Grafik diatas menggambarkan kelompok usia terbesar adalah usia 50-55 sebanyak 1.120 atau 24,5%, disusul usia 46-50 tahun sebanyak 868 atau 19% dan usia 56-60 tahun sebanyak 762 orang atau 16,6%. Ini berarti SDM TVRI didominasi oleh usia 46-60 tahun yaitu sebanyak 2.750 atau 60,2%. Sementara itu jumlah PNS yang pensiun 5 tahun kedepan mencapai 1.493 sampai tahun 2023. Jumlah tersebut cukup besar sehingga perlu perencanaan SDM dan rekrutmen SDM untuk mengganti pegawai yang pensiun dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian kinerja setiap tahunannya.

Tabel 1.1  
Jumlah PNS TVRI Pensiun Tahun 2019-2023

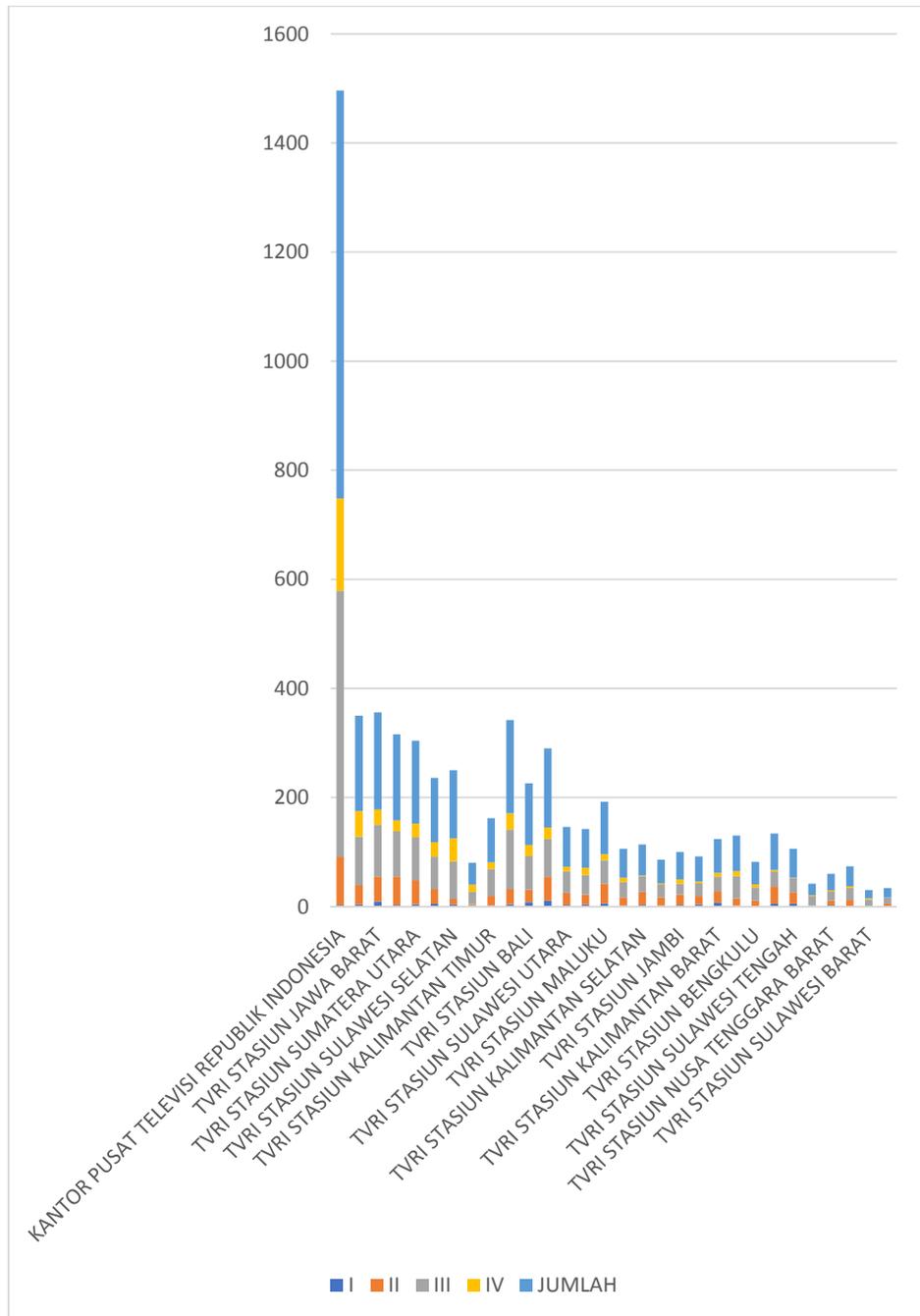
NO	UNIT KERJA	2019	2020	2012	2022	2023	JUMLAH
1	Kantor Pusat Televisi Republik Indonesia	99	99	96	65	66	425
2	TVRI Stasiun Tipe A	149	153	172	137	135	746
3	TVRI Stasiun Tipe B	40	63	56	53	65	277
4	TVRI Stasiun Tipe C	5	9	14	8	9	45
	Jumlah	293	324	338	263	275	1.493

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah PNS yang pensiun terbanyak pada stasiun penyiaran daerah mencapai 1068 orang sampai tahun 2023. Sedangkan PNS yang pensiun di Kantor Pusat sebanyak 425 orang. Secara keseluruhan jumlah PNS yang mengalami Pensiun sebanyak 1.493 dibandingkan dengan PNS saat ini sebanyak 3.101 mencapai 48,14%.

Sebaran PNS berdasarkan golongan yang terbesar adalah golongan III sebanyak 1.744 orang, disusul golongan II sebanyak 702 dan golongan IV sebanyak 543 orang.

Gambar 1.4.

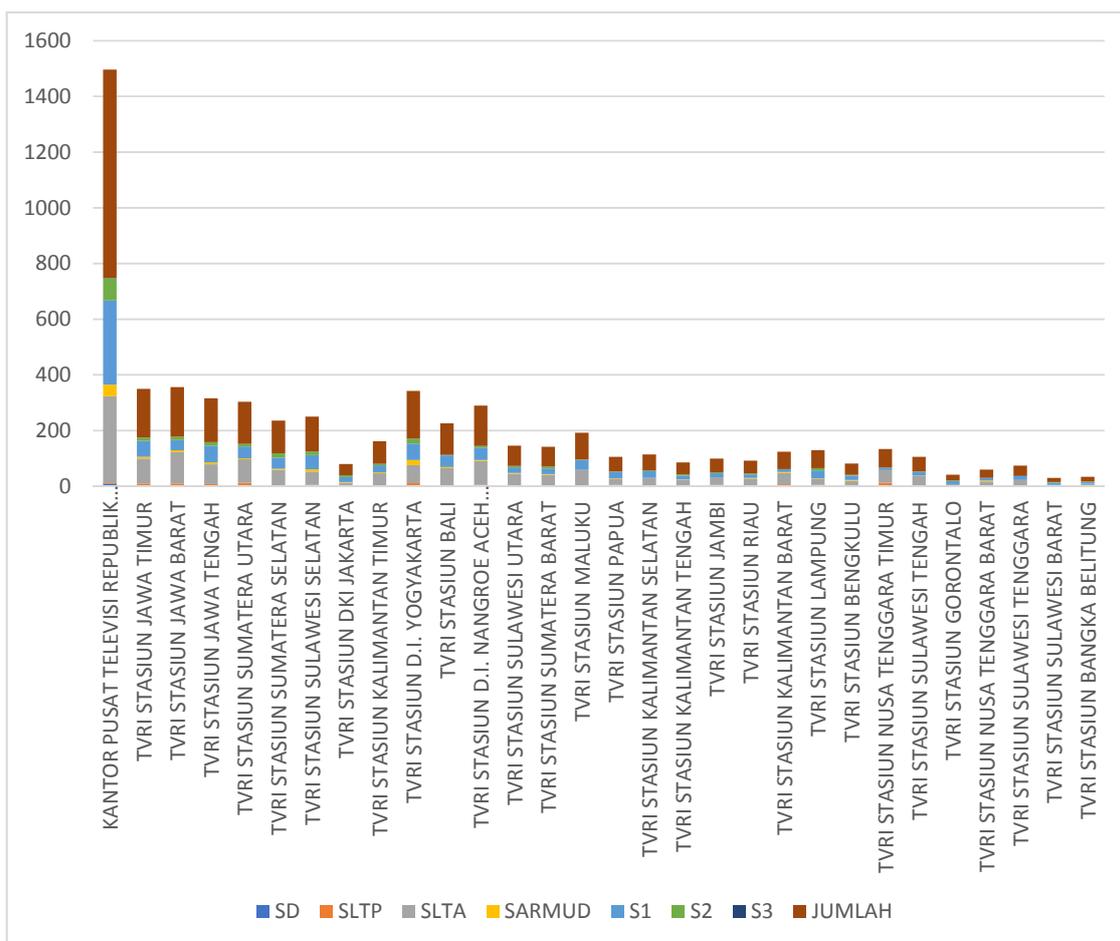
Jumlah PNS berdasarkan Golongan Per 1 Desember 2020



Sebaran SDM berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh tingkat SLTA sebanyak 1.522 orang atau sebanyak 49.08% diikuti oleh Sarjana (S1) sebanyak 1.062 orang atau 34,24%. Sebanyak (S2) sebanyak 241 orang atau 7,77%.

Tabel 1.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 1 Mei 2020



Terdapat ketidakseragaman/ketimpangan jumlah beban kerja antara satu stasiun dengan stasiun lainnya, baik pada stasiun penyiaran yang sama, maupun antara masing-masing stasiun penyiaran. Padahal tuntutan terhadap penyelenggaraan program antara satu stasiun penyiaran dengan stasiun penyiaran lainnya sama karena jumlah jam siaran yang sama yaitu 4 jam setiap hari. Hal ini dapat dilihat bahwa baik stasiun penyiaran Tipe A, Tipe B dan Tipe C menyelenggarakan siaran selama 4 jam setiap hari. Hasil analisis ABK menunjukkan bahwa TVRI mengalami kekurangan SDM sebanyak 1.003 orang. Jumlah tersebut harus dipenuhi melalui rekrutmen TVRI. Berdasarkan formasi SDM dari

Kementerian PAN-RB dalam tahun 2019-2020 TVRI memperoleh formasi CPNS sebanyak 300 orang, yang termasuk dalam formasi SDM Kementerian Kominfo sebanyak 581 orang yang terdiri

- a. Kementerian Kominfo sebanyak : 180 CPNS
- b. Radio Republik Indonesia (RRI) : 101 CPNS
- c. Televisi Republik Indonesia (TVRI) : 300 CPNS

Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja pegawai (ABK) pada masing-masing unit kerja sebanyak 1.003 orang.

Tabel 1.2.  
Jumlah Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pegawai (ABK)  
Pada Masing-masing Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	JUMLAH BEBAN (BOBOT KERJA JABATAN (DALAM MENIT)	JUMLAH KEBUTUHAN PEJABAT/ PEGAWAI		JUMLAH PEJABAT/ PEGAWAI YANG ADA	+ / -
1	DIREKTORAT PROGRAM DAN BERITA	57.714.480	558,59	559	514	-44,59
2	DIREKTORAT KEUANGAN	5.251.680	83,94	84	66	-17,94
3	DIREKTORAT TEKNIK	28.654.560	370,98	371	244	-126,98
4	DIREKTORAT UMUM	10.877.040	227,07	227	176	-51,07
5	DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA	8.106.480	123,59	124	94	-29,592
6	SPI	2.239.920	37,11	37	24	-13,11
7	PUSLITBANG	1.436.400	18,95	19	17	-1,95
8	PUSDIKLAT	3.939.840	50,72	51	41	-9,72
9	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	21.481.200	285,35	285	238	-47,35
10	TVRI STASIUN JAWA BARAT	17.250.480	226,59	227	196	-30,59
11	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	18.362.880	240,04	240	204	-36,04
12	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	14.317.920	191,86	192	177	-14,86
13	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	15.197.760	194,08	194	148	-46,08
14	TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN	19.701,360	243,63	244	194	-49,63
15	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	11.656.800	134,90		106	-28,9

NO	UNIT KERJA	JUMLAH BEBAN (BOBOT KERJA JABATAN (DALAM MENIT))	JUMLAH KEBUTUHAN PEJABAT/ PEGAWAI		JUMLAH PEJABAT/ PEGAWAI YANG ADA	+ / -
				135		
16	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	10.512.720	124,01	124	121	-3,01
17	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	21.700.080	272,39	272	219	-53,39
18	TVRI STASIUN BALI	14.219.280	187,49	187	160	-27,49
19	TVRI STASIUN D.I. NANGROE ACEH DARUSSALAM	15.127.200	197,10	197	170	-27,1
20	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	9.514.080	113,14	113	102	-11,14
21	TVRI STASIUN SUMATERA BARAT	10.900.800	133,39	133	107	-26,39
22	TVRI STASIUN MALUKU	13.205.520	163,41	163	129	-34,41
23	TVRI STASIUN PAPUA	8.295.120	108,21	108	87	-21,21
24	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	9.280.800	120,90	121	93	-27,9
25	TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH	8.837.280	111,74	112	92	-19,74
26	TVRI STASIUN JAMBI	22.618.800	88,15	88	72	-16,15
27	TVRI STASIUN RIAU	7.043.760	86,83	87	74	-12,83
28	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	8.750.880	108,54	109	89	-19,54
29	TVRI STASIUN LAMPUNG	8.400.960	106,68	107	98	-8,68
30	TVRI STASIUN BENGKULU	5.585.040	67,57	68	59	-8,57
31	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR	10.095.120	132,21	132	102	-30,21
32	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH	9.385.920	114,36	114	105	-9,36
33	TVRI STASIUN GORONTALO	5.857.920	75,36	75	62	-13,36
34	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT	7.179.120	91,71	92	71	-20,71
35	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA	11.072.160	150,78	151	98	-52,78
36	TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	4.746.240	58,92	59	53	-5,92
37	TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	3.173.760	41,08	41	37	-4,08
	<b>JUMLAH</b>	<b>461.6990.640</b>	<b>5.641,37</b>	<b>5.641</b>	<b>4.639</b>	<b>-1002,37</b>

Total jumlah pegawai LPP TVRI berdasarkan data tahun 2018 adalah sebanyak 4.639 orang dengan perkiraan kebutuhan berdasarkan beban kerja di masing-masing direktorat kantor pusat dan stasiun televisi daerah adalah sebanyak 5.461 orang pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi dari ketidakseragaman/ketimpangan jumlah beban kerja antara satu stasiun televisi dengan stasiun televisi lainnya, baik pada tipe yang sama maupun di antara masing-masing tipe, mengakibatkan terjadinya kekurangan pegawai sekitar 1.003 orang pegawai.

### B. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas LPP TVRI, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki LPP TVRI. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPP TVRI khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di LPP TVRI dirasakan masih belum dapat mencukupi dan memadai dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini.

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Volume	PUSAT		DAERAH		Keterangan
				Baik	Rusak Berat	Baik	Rusak Berat	
1.	Gedung Kantor	674	167.837 m2	19	1	567	87	
2.	Kendaraan roda 4	472	unit	119	4	277	72	
3.	Kendaraan roda 2	326	unit	42	3	149	132	
4.	Peralatan kantor	7420	unit	1635	1948	2661	1176	
5.	Peralatan Produksi dan Penyiaran	10226	unit	2327	3058	3516	1325	

6.	Peralatan Transmisi	361	unit					
7.	Peralatan IT							
8.	Buku Perpustakaan	0				0	0	

Tabel 1.4 Aset Tanah

No.	Lokasi	Jumlah Aset	Volume (m)		Alas Hak TVRI		Keterangan
			Sertifikat	Belum Sertifikat	Sertifikat	Belum Sertifikat	
1.	Kantor Pusat	22	369,996	3,000	21	1	1 Belum Bersertifikat
2.	Stasiun Penyiaran DKI Jakarta	2	6,025	0	2	0	-
3.	Stasiun Penyiaran Aceh	40	130,642	65,531	25	15	10 Tanah Milik Pemda, 3 Milik Tanah Intansi Lain, 2 Tanpa Keterangan
4.	Stasiun Penyiaran Sumatera Utara	32	49,270	55.524	17	15	14 Tanah Milik Pemda, 1 Tanpa Dokumen
5.	Stasiun Penyiaran Sumatera Barat	16	49,520	19.500	12	4	1 Tanah Milik Pemda, 1 Milik Tanah Intansi Lain, 2 Tanpa Keterangan
6.	Stasiun Penyiaran Riau	17	42,510	59,945	9	8	2 Tanah Milik Pemda, 5 Milik Tanah Intansi Lain, 1 Tanpa Keterangan
7.	Stasiun Penyiaran Jambi	11	44,500	48,905	6	5	3 Tanah Milik Pemda, 2 Milik Tanah Intansi Lain
8.	Stasiun Penyiaran Sumatera Selatan	16	69,162	2,701	14	2	1 Tanah Milik Pemda, 1 Milik Tanah Intansi Lain
9.	Stasiun Penyiaran Bangka Belitung	6	10,911	8,452	2	4	4 Milik Tanah Intansi Lain
10.	Stasiun Penyiaran Bengkulu	10	35,732	35,380	9	1	1 Tanah Milik Pemda
11.	Stasiun Penyiaran Lampung	9	44,513	3000	8	1	1 Tanah Milik Pemda
12.	Stasiun Penyiaran Jawa Barat - Banten	68	51,020	74,612	50	18	2 Tanah Milik Pemda, 15 Tanpa Keterangan, 1 Milik Desa
13.	Stasiun Penyiaran Yogyakarta	4	52,789	0	4	0	-
14.	Stasiun Penyiaran Jawa Tengah	22	42,047	72,405	12	10	4 Tanah Milik Pemda, 6 Milik Tanah Intansi Lain

No.	Lokasi	Jumlah Aset	Volume (m)		Alas Hak TVRI		Keterangan
			Sertifikat	Belum Sertifikat	Sertifikat	Belum Sertifikat	
15.	Stasiun Penyiaran Jawa Timur	25	132,281	84,649	13	12	2 Tanah Milik Pemda, 9 Milik Tanah Intansi Lain, 1 Tanpa Keterangan
16.	Stasiun Penyiaran Bali	9	41,125	7,320	7	2	2 Tanah Milik Pemda
17.	Stasiun Penyiaran Kalimantan Barat	28	99,387	6,000	25	3	3 Tanpa Keterangan
18.	Stasiun Penyiaran Kalimantan Tengah	21	46,867	29,794	16	5	1 Tanah Milik Pemda, 4 Tanpa Keterangan
19.	Stasiun Penyiaran Kalimantan Selatan	10	35,130	11,450	7	3	2 Belum Bersertifikat TVRI, 1 Tanah Milik Pemda
20.	Stasiun Penyiaran Kalimantan Timur	15	93,821	130,130	7	8	3 Belum Bersertifikat TVRI, 5 Tanah Milik Pemda
21.	Stasiun Penyiaran Sulawesi Utara	16	28,788	20,864	12	4	3 Belum Bersertifikat TVRI, 1 Tanah Milik Pemda
22.	Stasiun Penyiaran Sulawesi Tenggara	15	93,705	42,280	12	3	2 Tanah Milik Pemda, 1 Milik Tanah Intansi Lain
23.	Stasiun Penyiaran Sulawesi Tengah	25	87,631	12,857	18	7	5 Tanah Milik Pemda, 1 Milik Desa, 1 Tanpa Keterangan
24.	Stasiun Penyiaran Sulawesi Selatan	15	106,729	0	15	0	-
25.	Stasiun Penyiaran Sulawesi Barat	6	41,034	0	6	0	-
26.	Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Barat	13	35,138	28,007	8	5	1 Tanah Milik Pemda, 4 Milik Tanah Intansi Lain
27.	Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Timur	29	68,220	18,096	18	11	9 Belum Bersertifikat TVRI, 2 Tanah Milik Pemda
28.	Stasiun Penyiaran Maluku	16	52,229	10,900	10	6	1 Belum Bersertifikat TVRI, 2 Tanah Milik Pemda, 1 Milik Tanah Intansi Lain, 2 Tanpa Keterangan
29.	Stasiun Penyiaran Papua	24	103,547	11,600	21	3	2 Acara Pelepasan Adat, 1 Tanpa Keterangan
30.	Stasiun Penyiaran Gorontalo	8	12,806	0	8	0	-

#### 1.4. Rencana Program Tahun 2020 dan Pendanaannya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun pertama dari rencana strategis LPP TVRI periode 2020-2024, maka LPP TVRI didukung oleh beberapa program kerja dan pendanaannya serta alokasi di masing-masing satuan kerja (Satker). Adapun rencana program kerja tahun 2020 dan pendanaannya serta alokasi di masing-masing satuan kerja sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel. 1.5 Alokasi Per Program Tahun Anggaran 2020

No.	Program	2020
1.	01	349.826.274.000
2.	06	934.558.868.000
<b>Total Alokasi</b>		<b>1.284.385.142.000</b>

Tabel 1.6 Alokasi Per Satker Tahun Anggaran 2020

No.	Kode Satker	TVRI Stasiun	PAGU	REVISI PAGU
1	700200	KANTOR PUSAT TVRI	588.248.196.000	570.279.724.000
2	700210	TVRI STASIUN BALI	21.203.175.000	29.517.529.000
3	700211	TVRI STASIUN BENGKULU	11.956.268.000	15.293.759.000
4	700212	TVRI STASIUN D.I. ACEH	21.071.320.000	31.616.295.000
5	700213	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	27.762.591.000	38.311.743.000
6	700214	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	15.771.986.000	23.678.485.000
7	700215	TVRI STASIUN GORONTALO	10.515.845.000	14.775.321.000
8	700216	TVRI STASIUN JAMBI	13.033.287.000	16.169.989.000
9	700217	TVRI STASIUN JAWA BARAT	26.767.854.000	36.882.297.000
10	700218	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	28.147.930.000	37.804.872.000
11	700219	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	33.552.420.000	43.178.476.000
12	700220	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	13.621.779.000	18.648.031.000
13	700221	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	14.177.644.000	19.365.800.000
14	700222	TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH	15.176.629.000	19.971.429.000
15	700223	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	21.129.806.000	28.720.007.000
16	700224	TVRI STASIUN LAMPUNG	14.908.353.000	20.535.207.000
17	700225	TVRI STASIUN MALUKU	16.091.425.000	24.386.886.000
18	700226	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT	10.684.370.000	14.909.630.000
19	700227	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR	15.631.739.000	21.357.112.000
20	700228	TVRI STASIUN PAPUA	17.717.103.000	21.241.660.000
21	700229	TVRI STASIUN RIAU	14.283.435.000	18.447.629.000
22	700230	TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN	25.076.201.000	35.941.170.000
23	700231	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH	15.174.041.000	21.072.102.000
24	700232	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA	13.304.815.000	19.922.100.000
25	700233	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	16.039.727.000	21.603.673.000
26	700234	TVRI STASIUN SUMATERA BARAT	16.772.678.000	24.522.816.000
27	700235	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	23.195.173.000	32.560.279.000
28	700236	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	25.922.068.000	36.371.037.000
29	700237	LPP TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	8.791.655.000	12.547.131.000
30	700238	LPP TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	12.222.573.000	14.752.953.000
		Total	1.107.952.086.000	1.284.385.142.000

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis 2020-2020**

Untuk mewujudkan visi dan misi LPP TVRI tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Renstra LPP TVRI Tahun 2020-2024, LPP TVRI menetapkan visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahwa seluruh rencana strategis Kementerian/Lembaga periode 2020-2024 harus mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2020-2024 yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Untuk itu, Visi Renstra LPP TVRI 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah sebagai berikut :

**“ Terwujudnya LPP TVRI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-royong.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Untuk itu, Misi dalam Renstra LPP TVRI 2020-2024 sesuai dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan negara sesuai kewenangan LPP TVRI;
2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengelolaan sumber-sumber, pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan LPP TVRI
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana LPP TVRI

Untuk mencapai visi dan misi maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra LPP TVRI periode 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Televisi Republik Indonesia yang terintegrasi di seluruh Indonesia

Tujuan strategis tersebut merupakan *outcome* LPP TVRI dalam jangka waktu 5 tahun atau dalam jangka waktu menengah dalam rangka mencapai visi dan misi LPP TVRI sebagai alat persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa. Tujuan strategis tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis dengan capaian jangka waktu yang lebih pendek yaitu capaian per tahun. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam mewujudkan tujuan organisasi LPP TVRI adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas produksi dan siaran televisi yang akan diemban oleh Direktorat Program dan Berita, Direktorat Teknik dan Direktorat Pengembangan Usaha.
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Internal TVRI yang akan diemban oleh Direktorat Keuangan dan Direktorat Umum.

Sehubungan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan transformasi digital sesuai dengan RJPMMN 2020-2024, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis LPP TVRI. Adapun Tujuan dan sasaran LPP TVRI dalam Renstra Periode 2020-2024 sebanyak satu tujuan strategis dan dua sasaran strategis. Adapun tujuan dan sasaran strategis LPP TVRI Periode 2020-2024 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.

## Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra LPP TVRI Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya peningkatan pelayanan siaran TV publik yang modern	Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik	1. <i>Audience Share/rating</i>	1.62	1.7	2	2.2	2.4	2.5
		2. <i>Public Values</i>	0	3	3,1	3,2	3,4	3,5
		3. <i>Public Participation</i>	0,3%	0,6%	1,2%	1,8%	2,4%	3,0%
		4. Populasi yang terlayani penyiaran digital	52%	53%	60%	70%	75%	80%
		5. <i>Share</i> Nilai Marketing terhadap Pendapatan	5.3%	5.6%	11.7%	7.7%	6.4%	5.9%
	Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Indeks RB	49,83	60	70	80	100	100
		3. Indeks Layanan Publik	8.52	8.60	8.70	8.80	9.0	9.2
		4. Nilai SAKIP	50.13	60	70	80	100	100
		5. Zona Integritas	0 Unit kerja	3 Unit kerja	7 Unit kerja	10 Unit kerja	10 Unit kerja	5 Unit kerja
		6. Jumlah Peningkatan PNBPN	131,567 M	132,2 M	292,8 M	537 M	789,60 M	1030,3 M

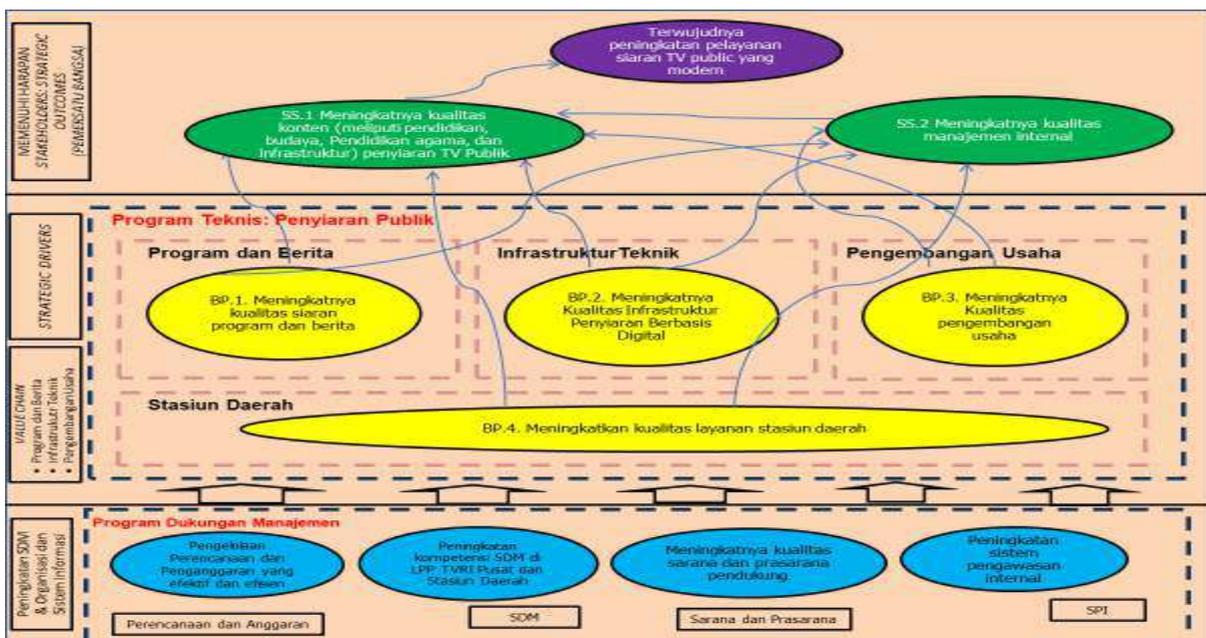
Sebagaimana tabel Indikator kinerja utama diatas pada Sasaran Strategis utama, yaitu "Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik" sesuai dengan amanat RPJMN target yang akan dicapai dalam matriks kinerja tersebut adalah :

1. Siaran pendidikan dan budaya pada Kegiatan Program dan berita, ditargetkan sebesar 2.920 jam siar pada tahun 2024
2. Siaran pendidikan dan agama, ditargetkan sebesar 1.600 jam siar pada tahun 2024
3. Migrasi infrastruktur, peralatan produksi dan siaran yang berbasis teknologi digital, dengan target 100 unit pada 2024
4. Populasi yang terlayani penyiaran digital ditargetkan 80% pada tahun 2024

Untuk itu, pencapaian sasaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan diatas, diharapkan LPP TVRI semakin diterima oleh masyarakat, sehingga program dan konten yang disampaikan semakin banyak diterima oleh masyarakat

Sebagaimana tabel diatas, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran LPP TVRI tahun 2020-2024 maka peta strategi yang dibangun adalah sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 *Strategy Map* LPP TVRI 2020-2024



## 2.2. Penetapan Kinerja LPP TVRI Tahun 2020

Tahun 2020 LPP TVRI melaksanakan program-program yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 beserta indikator kinerja yang dijabarkan secara berjenjang di setiap level organisasi. LPP TVRI memiliki 5 (lima) Indikator kinerja utama di tingkat Lembaga yaitu:

1. *Audience Share/rating*
2. *Public Values*
3. *Public Participation*
4. Populasi yang terlayani penyiaran digital
5. *Share Nilai Marketing terhadap Pendapatan*

Sebagai bentuk akuntabilitas maka Penetapan IKU LPP TVRI Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

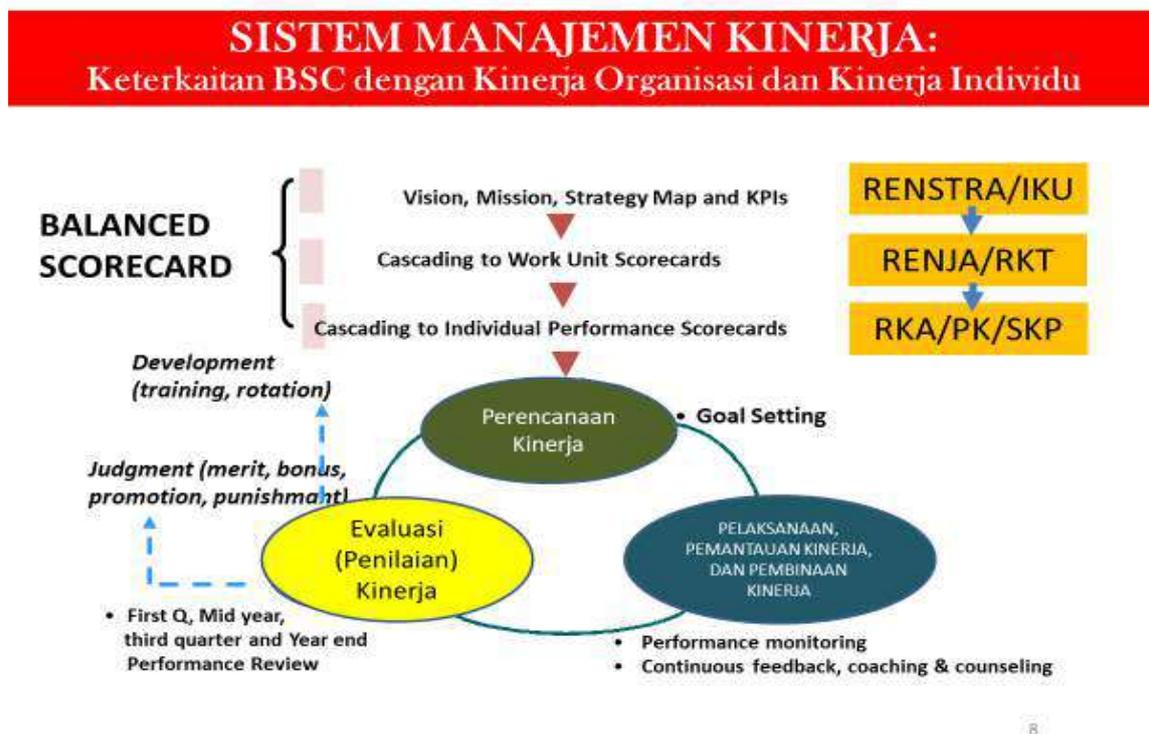
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja LPP TVRI Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET 2020
Terwujudnya peningkatan pelayanan siaran TV publik yang modern	Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik	1. <i>Audience Share/rating</i>	1.62	1.7
		2. <i>Public Values</i>	0	3
		3. <i>Public Participation</i>	0,3%	0,6%
		4. Populasi yang terlayani penyiaran digital	52%	53%
		5. <i>Share Nilai Marketing terhadap Pendapatan</i>	5.3%	5.6%
	Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan	1. Opini BPK	WTP	WTP
		2. Indeks RB	49,83	60
		3. Indeks Layanan Publik	8.52	8.60
		4. Nilai SAKIP	50.13	60
		5. Zona Integritas	0 Unit kerja	3 Unit kerja
		6. Jumlah Peningkatan PNBPN	131,567 M	132,2 M

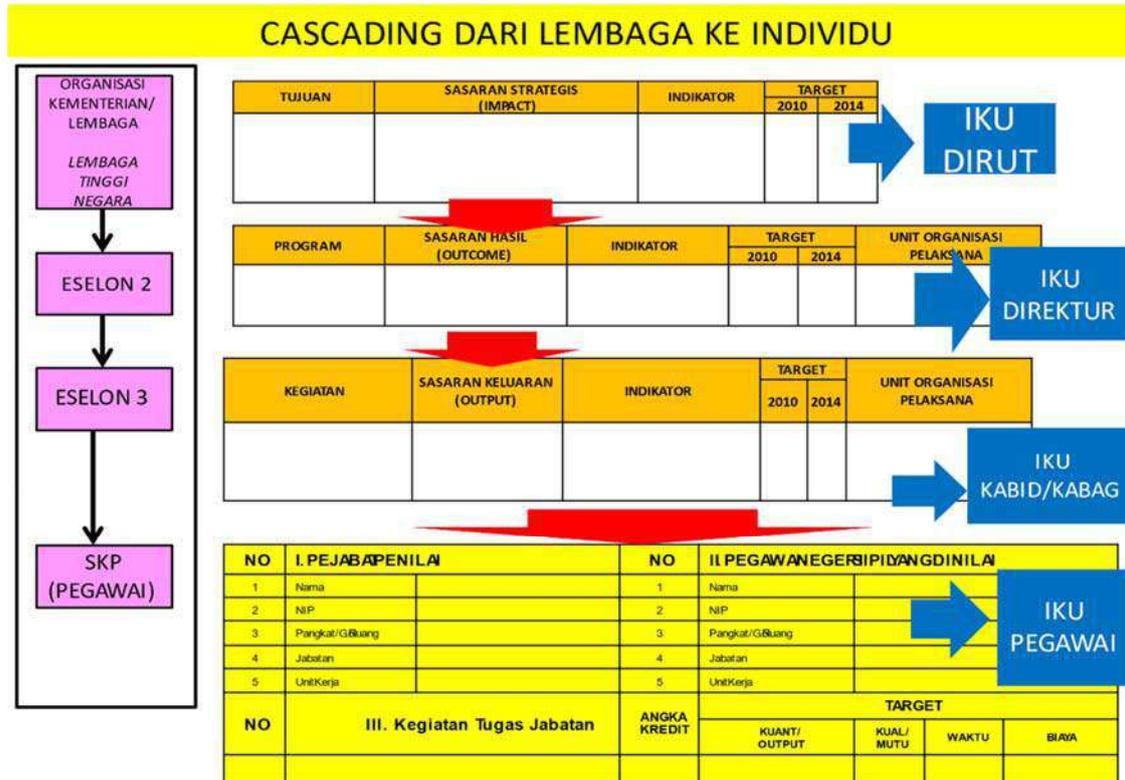
Tabel diatas adalah penetapan kinerja LPP TVRI untuk tahun 2020 yang merupakan penetapan kinerja tahun ke 1 (satu) dari Renstra LPP TVRI periode 2020-2024 merupakan indikator kinerja utama Lembaga LPP TVRI yang menjadi tanggungjawab

Direktur Utama LPP TVRI dan selanjutnya Penetapan kinerja lembaga LPP TVRI tersebut akan dijabarkan ke dalam penepatan kinerja organisasi eselon II baik ditingkat pusat maupun stasiun TVRI daerah kebawah sampai di *cascading* ke masing-masing pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangan jabatannya. Adapun penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan kepada Indikator Kinerja Individu yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) melalui suatu sistem manajemen kinerja yang diproses dengan pendekatan *balance scorecard* sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.2 Sistem Manajemen Kinerja LPP TVRI



Gambar 2. 3 *Cascading* dari IKU kepada IKI/SKP



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Sasaran LPP TVRI Tahun 2020**

Sebagaimana pada Bab II yang telah dijelaskan diatas tentang penetapan kinerja TVRI pada awal tahun 2020, maka pada akhir tahun 2020 LPP TVRI telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra periode 2020-2024 dengan capaian realisasi atas target yang telah ditetapkan sebagaimana pada Tabel pencapaian kinerja TVRI Tahun 2020 dibawah ini.

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja TVRI Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	BOBOT CAPAIAN
Terwujudnya peningkatan pelayanan siaran TV publik yang modern	Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik	1. <i>Audience Share/ rating</i>	1.7	1.43	84 %
		2. <i>Public Values</i>	3	3.60	120%
		3. <i>Public Participation</i>	0,6%	0.6%	100%
		4. Populasi yang terlayani penyiaran digital	78.3%	78.43%	0.13%
		5. <i>Share</i> Nilai Marketing terhadap Pendapatan	5.6%	204,9	188,5%
	Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan	1. Opini BPK	WTP	Masih Proses	Masih Proses
		2. Indeks RB	60	Masih Proses	Masih Proses
		3. Nilai SAKIP	60	Masih Proses	Masih Proses
		4 Jumlah Peningkatan PNBP	132,2 M	Rp. 209,2 M	158 %

Sebagaimana Tabel pencapaian diatas, dari 2 Sasaran strategis, yaitu sasaran strategis pertama adalah Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik dengan 5 (lima) Indikator kinerja utama adalah indikator

1. *Audience Share/rating*
2. *Public Values*
3. *Public Participation*
4. Populasi yang terlayani penyiaran digital
5. *Share* Nilai Marketing terhadap Pendapatan

Secara umum capaian di indikator kinerja utama tersebut sudah dicapai dengan cukup baik dan dari ke 5 (lima) Indikator kinerja utama tersebut, untuk masing-masing indikator 2, 3, 4 dan 5 telah mencapai realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan indicator 1 capaian realisasinya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan capaian pada sasaran strategi kedua adalah Meningkatnya kualitas manajemen internal dengan 4 (empat) indikator kinerja utama di tingkat Lembaga yaitu indikator

1. Opini BPK
2. Indeks RB
3. Nilai SAKIP
4. Jumlah Peningkatan PNB

Dari 4 (empat) Indikator tersebut, indikator 1 dan 4 telah tercapai realisasi sesuai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan indikator 2 dan 3 capaian realisasinya masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

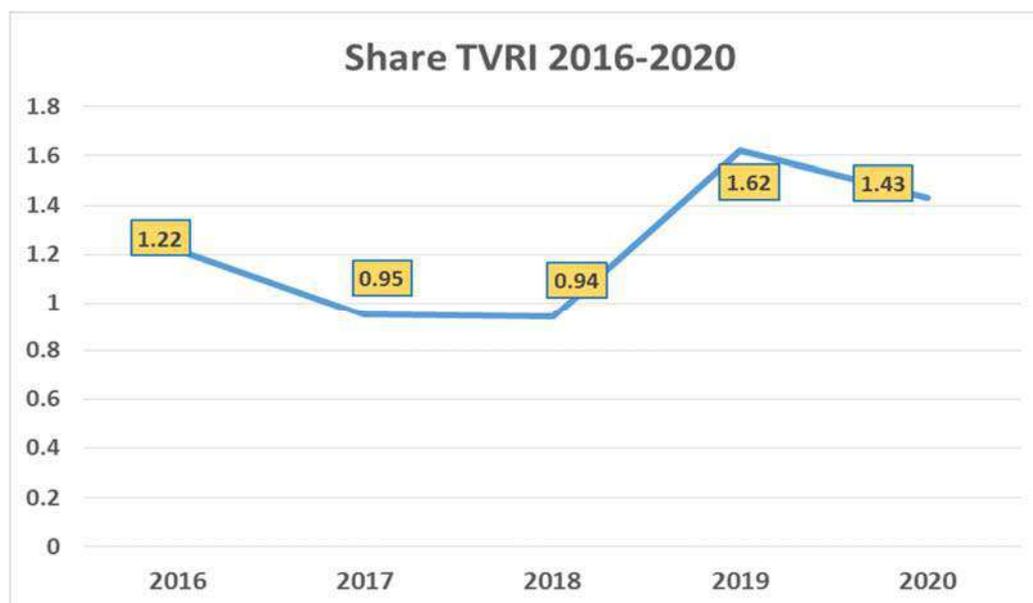
Secara umum seluruh indikator kinerja utama LPP TVRI sudah tercapai dengan cukup baik namun pencapaian tersebut masih ada capaian yang belum dicapai secara maksimal. Adapun penjelasan hasil analisis dan evaluasi capaian dari masing-masing indikator kinerja utama LPP TVRI tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut ini :

### 3.2 Analisis dan Evaluasi hasil capaian Kinerja Tahun 2020

#### 1. Indikator Kinerja Utama : *Audience Share/ rating*

Sebagaimana hasil survei Nielsen Tahun 2020, capaian Indikator *Audience Share/ rating* untuk TVRI adalah sebesar 1,43% dari target 1,7%, capaian tersebut menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,62%. Survei Nielsen ini diambil sampelnya di sebelas kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Aceh, Medan Palembang, Makasar, Banjarmasin dan Surakarta) dengan menggunakan alat peplemeter. Jika dilihat dari hasil capaian *share* yang diakumulasi dari data 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2016 s.d 2020, maka hasil *audience share* TVRI cukup dapat dilihat secara fluktuatif. Jika dibanding tahun lalu memang sedikit turun, namun jika dibanding 3 tahun sebelumnya *Share* TVRI tahun 2020 cukup baik.

Gambar 3.1 *Share* TVRI 2016-2020



Dari hasil survei tahun 2020 tersebut, dapat terlihat profil populasi penduduk menyatakan bahwa TVRI Nasional telah menjangkau kepada pemirsa :

- Perempuan
- Usia 40-49 tahun dan diatas 50 tahun
- SEC *Upper 2* dan *Lower*
- Jenis pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Wirausahawan, dan Pensiunan

- Tingkat pendidikan pemirsanya didominasi tidak tamat sekolah dan tamatan Sekolah Dasar

Adapun profil populasi penduduk dalam survei Nielsen dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2

### Profil Demografi TVRI Tahun 2020

Year	2020
Target\Channel	TVRI NAS
(P) - SEX(FEMALE)	101
(P) - SEX(MALE)	99
(P) - AGE(5-9 YEARS)	92
(P) - 10-19	78
(P) - 20-29	65
(P) - 30-39	81
(P) - 40-49	131
(P) - 50+	155
(P) - Upper 1	86
(P) - Upper 2	109
(P) - Middle 1	92
(P) - Middle 2	99
(P) - Lower	120
(P) - Housewives	130
(P) - White Collar	91
(P) - Blue Collar	92
(P) - Entrepreneur	110
(P) - Students	81
(P) - Retired	106
(P) - Elementary Not Finished	102
(P) - Elementary	111
(P) - Secondary	96
(P) - High School	96
(P) - Academy/University	98

Penurunan pencapaian kinerja indikator Nielsen tersebut terdapat beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu:

- Belum adanya konten unggulan yang dapat mengikat penonton.
- Kriteria struktur program siaran TVRI dengan komposisi sebagian besar atau hampir 60% berupa informasi, 30% Pendidikan, agama dan budaya serta 20% hiburan.
- Adanya perubahan sistem transisi penyiaran dari analog ke digital (ASO) sehingga ada beberapa wilayah survei Nielsen yang kurang baik

penerimaannya karena penerimaan dari rumah masyarakat masih menggunakan analog.

- Kurang disiplinnya dalam mengikuti Pola acara yang disebabkan adanya kegiatan yang perlu disiarkan secara mendadak seperti kegiatan kenegaraan sehingga mengubah pola acara yang telah ditetapkan.
- TVRI sebagai TV Publik bukan mengutamakan *share* tapi tontonan yang ditayangkan mempunyai tuntunan dan mempunyai nilai manfaat atau perekat NKRI
- Kurangnya sosialisasi terhadap acara yang menjadi kekuatan bagi TVRI seperti kearifan lokal, budaya dan hiburan.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk mencapai target peningkatan jumlah penonton seperti;

- Peningkatan Kualitas konten acara. (kualias mata acara, contoh kemasan, pengisi acara)
- Menayangkan acara atau program baru baik hiburan maupun Olahraga yang diidolakan masyarakat seperti Bulutangkis dan Sepak bola.
- Digitalisasi pemancar secara bertahap.
- Disiplin dalam mengikuti Pola Acara yang ditetapkan.
- Program acara Informasi sudah mulai dikurangi dan menambah acara hiburan diantaranya Rumah musik dan musik Indonesia serta Losmen.

Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya tuntutan publik terhadap dunia penyiaran televisi maka diperlukan :

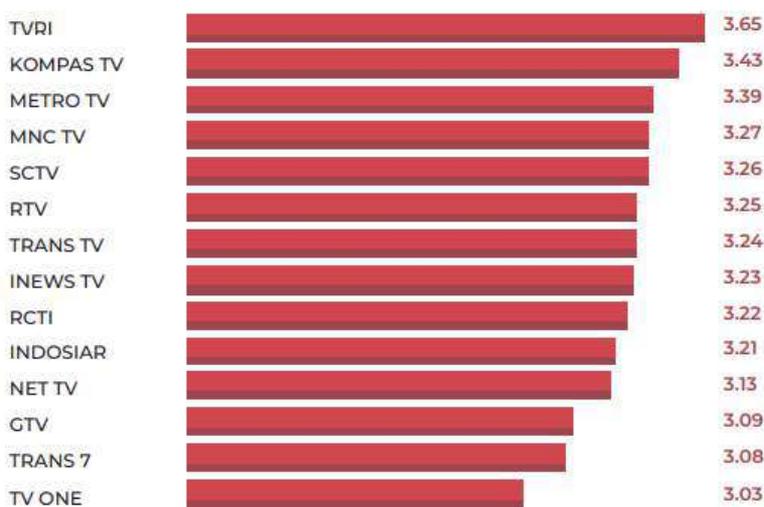
- Acara unggulan yang dpat mengikat penonton.
- Memperluas wilayah survei Nielsen secara Nasional.
- Perlu menyeimbangkan katagori siaran Informasi, hiburan dan pendidikan serta agama.
- Digitalisasi secara luas yang akan dimulai pada bulan November tahun 2022.

## 2. Indikator Kinerja Utama : *Public Value*

Sesuai dari hasil penilaian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahwa Program berita yang ditayangkan oleh TVRI selalu memiliki beberapa unsur dan karakter yang sangat kuat oleh karena merupakan media yang patut memberikan suatu informasi secara benar, faktual, bukan berita bohong (*hoax*) serta jauh dari pemberitaan yang menampilkan adegan keji dan unsur pornografi. Sedangkan lima televisi lainnya ditemukan masih terdapat suatu tayangan program berita menyajikan informasi yang menghakimi tersangka sebelum dijatuhkan vonis oleh hakim. Untuk mengetahui indeks kualitas program berita pada masing-masing televisi, dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar. 3.2

### Indeks Kualitas Program Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran

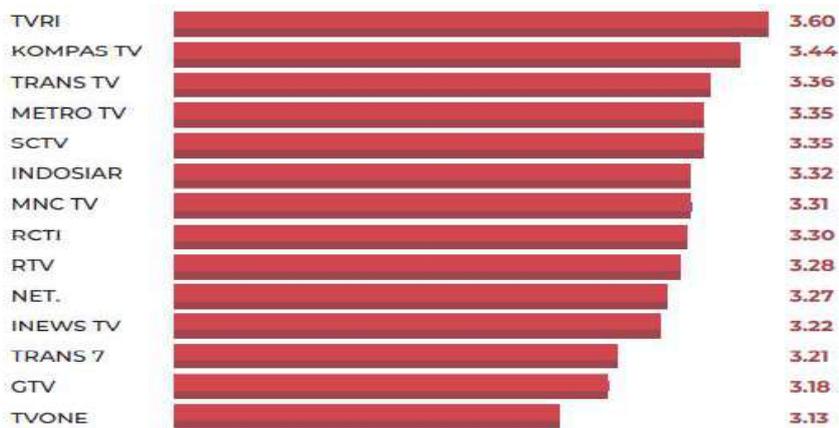


Sumber :KPI

Gambar di atas menunjukkan bahwa indeks program berita pada 14 televisi, tidak ada satu pun yang indeks program beritanya tidak mencapai standar indeks minimal yang

ditetapkan KPI (3.00). TVRI memiliki indeks program berita tertinggi dengan 3.65, sedangkan TV One memiliki indeks kualitas program berita terendah dengan 3.03.

Gambar 3.3



Dapat dilihat dari Gambar di atas bahwa TVRI memiliki indeks kualitas program berita tertinggi (3.60) untuk dimensi akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampur adukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Sedangkan TV One memiliki indeks kualitas program berita terendah (3.13) dibandingkan dengan 13 televisi yang lain. Namun demikian, indeks kualitas program berita pada 14 televisi sudah melebihi standar minimal yang ditetapkan oleh KPI (3.00). Untuk mengetahui hasil riset indeks kualitas program berita di 14 televisi secara rinci, untuk dimensi 1, dapat dilihat dari penjelasan berikut:

#### Pernyataan

- A : Program siaran berita berdasarkan fakta, yaitu benar terjadi dan benar diucapkan oleh narasumber
- B : Program siaran berita memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak
- C : Program siaran berita tidak berpihak kepada kepentingan tertentu, tapi untuk kepentingan publik
- D : Program siaran berita tidak mengadu domba dan disajikan sesuai dengan fakta
- E : Program siaran berita tidak mencampur adukkan fakta dengan opini
- F : Program siaran berita tidak menyajikan unsur kekerasan *verbal* dan *non verbal* secara berlebihan

- G : Program siaran berita tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

### 3. Indikator Kinerja Utama : *Public Participation*

Capaian untuk partisipasi publik dapat tergambar melalui beberapa program yang ada di TVRI Pusat maupun TVRI Stasiun Daerah. Secara umum capaian partisipasi publik telah tercapai sebesar 100%.

Untuk TVRI pusat pada bidang pemberitaan memiliki 3 program berita yaitu klik Indonesia pagi, klik Indonesia siang, dan klik Indonesia malam. Masing - masing berdurasi 1 jam. Dalam program berita ini selain menyampaikan informasi dan berita aktual juga menghadirkan masyarakat melalui wawancara dan kegiatan *vox pop* guna menangkap harapan masyarakat, kegelisahan dan keinginan mereka yang dituangkan dalam bentuk berita maupun wawancara.

Selain itu, partisipasi publik juga tercermin melalui program info covid yang disiarkan setiap hari pagi dan sore. Program ini difokuskan kepada pelayanan publik untuk mendapatkan informasi dan menyuarakan kebutuhan publik untuk menekan pandemi Covid-19. serta menyuarakan kepentingan pemerintah yang terus berupaya menekan laju angka positif covid di tengah masyarakat, disisi lain tenaga kesehatan juga diberi ruang untuk menyampaikan keinginan dan aspirasi mereka terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan pandemi.

Capaian pada bidang program memiliki program mengenai keagamaan seperti Serambi Islami, Satukan Shaf Indonesia, Program Misa tiap Minggu. Selain itu untuk program budaya seperti Pentas Budaya dengan tema wayang, ludruk, randai, Losmen.

Untuk membantu pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional TVRI mengakuisisi program PATEN, dimana program tersebut berisi tentang menumbuhkan semangat wirausaha muda dalam UMKM. TVRI juga gencar melakukan promosi UMKM melalui iklan layanan masyarakat, dokumenter, *talkshow*, hiburan, dan prgoram khusus kepresidenan.

Dalam situasi pandemi dimana TVRI ikut mensukseskan program PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maka diberlakukan sistem *Work Form Home* (WFH) sehingga beberapa kegiatan rutin termasuk administrasi membutuhkan waktu lebih panjang untuk diselesaikan dibandingkan situasi normal. Selain itu, merebaknya virus

covid-19 ini juga menginfeksi karyawan/karyawati TVRI termasuk petugas operasional akibatnya sejumlah kegiatan program yang sudah direncanakan tahun lalu tidak dapat terlaksana.

Karyawan/ karyawati di TVRI banyak memasuki usia pensiun di posisi strategis termasuk karyawan fungsional, sementara staf pengganti belum tersedia akibatnya mengganggu roda organisasi termasuk operasional.

Karyawan/karyawati untuk bidang program dan berita sangat minim dibandingkan dengan tenaga administrasi. Staf terkonsentrasi di bidang administrasi umum. Ini tidak realistis mengingat TVRI adalah lembaga Penyiaran. Dimana seharusnya karyawan yang paling banyak adalah orang-orang di operasional yang berada di program dan berita untuk mendukung produksi program di TVRI.

Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyiaran dalam kondisi tidak maksimal, banyak peralatan yang sudah tidak layak pakai untuk siaran bahkan ada juga peralatan yang meski pengadaannya baru tapi secara sistem dan spek tidak lengkap akibatnya hasil layar tidak maksimal. Studio penyiaran untuk berita di TVRI Nasional belum memenuhi standar penyiaran yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan jaman saat ini, teknologi masih mengadopsi masa lalu.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu :

- a) Karyawan yang melakukan *work from home* tetap melaksanakan tugas di rumah.
- b) Melakukan kontrak dengan tenaga profesional dan tim ahli untuk membantu tim produksi.
- c) Melakukan sewa peralatan yang benar dibutuhkan dalam produksi tetapi tidak dimiliki oleh TVRI.
- d) Melakukan penjadwalan produksi secara ketat sehingga permasalahan kekurangan SDM dapat diminimalisir dan begitu juga dengan keterbatasan peralatan dan studio dapat di atasi semaksimal mungkin.

langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang, yaitu :

- a) Melakukan penjadwalan *work from home* secara ketat dan terpantau oleh atasan langsung sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dari rumah.

- b) Tetap melakukan kontrak dengan tenaga profesional dan tim ahli secara selektif.
- c) Meminta Direktorat Teknik untuk menyiapkan peralatan atau pengadaan peralatan baru yang dibutuhkan dalam produksi dan penyiaran.
- d) Melaksanakan perencanaan jadwal produksi dari awal tahun yang terintegrasi dengan rencana penarikan dana untuk produksi.

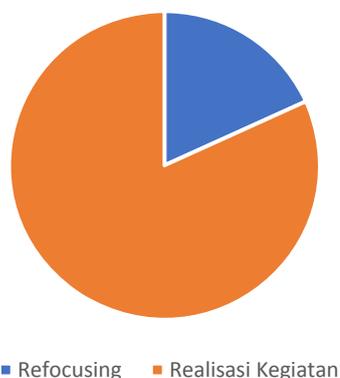
#### **4. Indikator Kinerja Utama : Populasi yang terlayani penyiaran digital (*Coverage population*)**

*Coverage Population* untuk DVBT2 atau Jumlah Masyarakat yang mampu menerima siaran dengan teknologi digital DVBT2 akan bertambah sebesar 1,07 % di tahun 2020 dengan membangun 12 Pemancar Digital DVBT2. Namun terdapat kendala dalam mewujudkan penambahan *coverage population Digital* karena adanya *refocusing* dana untuk mengatasi Covid 19 sehingga Direktorat Teknik hanya membangun 1 Satuan Transmisi di Pagar Alam Sumatera Selatan. Dengan demikian *coverage population* hanya bertambah sebesar 0,13 %. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Teknologi Chirplus untuk mengetahui *Coverage Population*. Sebelumnya TVRI telah mampu menjangkau 78,3 % penduduk Indonesia. Dengan demikian penambahan *coverage population* di tahun 2020 sekitar 0,13 %.

Disamping itu, untuk mendorong perluasan *coverage population* maka bidang Teknik Produksi dan Penyiaran pada tahun 2020 juga sudah merencanakan *up grade* studio ke Digital HD sebanyak 5 Studio. Namun rencana tersebut belum terlaksana karena adanya *refocusing* dana untuk penanggulangan Covid 19. Adapun perubahan dari rencana semula menjadi berubah 70% akibat adanya *refocusing* dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.4 Perubahan rencana akibat *refocusing*

Kegiatan Modernisasi dan Digitalisasi  
Direktorat Teknik Tahun 2020



Berbagai langkah yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan dengan cara menganggarkan kembali pekerjaan peningkatan *coverage population* dan *up grade* Studio HD di tahun anggaran 2021. Dengan demikian diharapkan nantinya sejumlah masyarakat akan dapat menikmati siaran Digital DVBT2 serta akan dapat meningkatkan kualitas produksi penyiaran dengan teknologi digital DVBT2.

Untuk mengantisipasi semakin dekatnya waktu pelaksanaan ASO maka diperlukan penggantian pemancar Analog menjadi Digital DVBT2 di wilayah layanan yang belum ada Pemancar DVBT 2. Sementara dari sisi produksi penyiaran akan berusaha melakukan *up grade* studio analog menjadi studio Digital HD di seluruh stasiun Penyiaran TVRI di Indonesia. Dengan demikian pada saat ASO di bulan November 2022 TVRI telah siap dalam melaksanakannya. Digitalisasi secara luas yang akan dimulai pada bulan November tahun 2022.

##### 5. Indikator Kinerja Utama : *Share Market*

Berdasarkan indikator *Share* Nilai Marketing terhadap Pendapatan diperoleh hasil Analisa sebagai berikut:

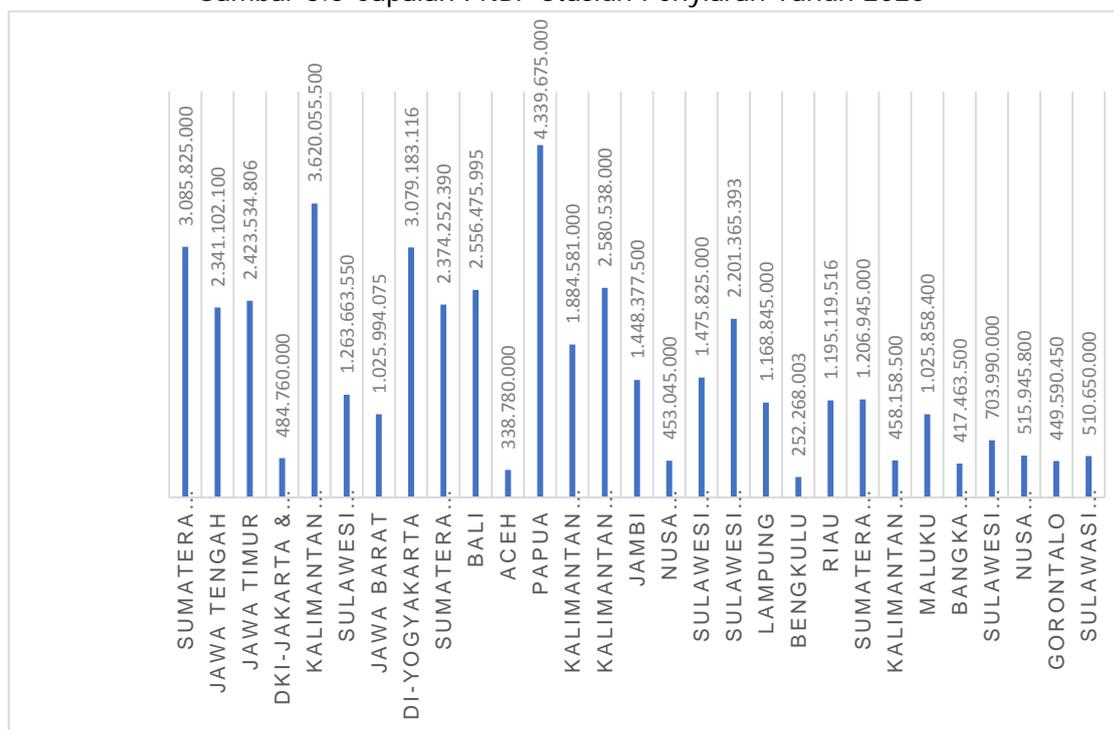
Tahun 2020 pendapatan (PNBP) ditargetkan sebesar Rp132,2 milyar. *Share* Nilai Marketing terhadap Pendapatan adalah 5,6 persen atau Rp. 7,4 milyar. *Share* Nilai Marketing adalah biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Direktorat Pengembangan dan Usaha dalam rangka mencapai target optimal PNBP. Implementasi kegiatan dilaksanakan oleh tiga bidang yaitu Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan

Evaluasi, Bidang Penjualan, Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha dan Bidang Penjualan Pemasaran Teknik dan Non Teknik.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target optimal PNBP antara lain: Memelihara dan meningkatkan hubungan kemitraan melalui *gathering, visit client, client handling*, melakukan promosi dan publikasi melalui berbagai media, melakukan penawaran, presentasi, dan *dealing*, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama serta kajian dan pembuatan peraturan.

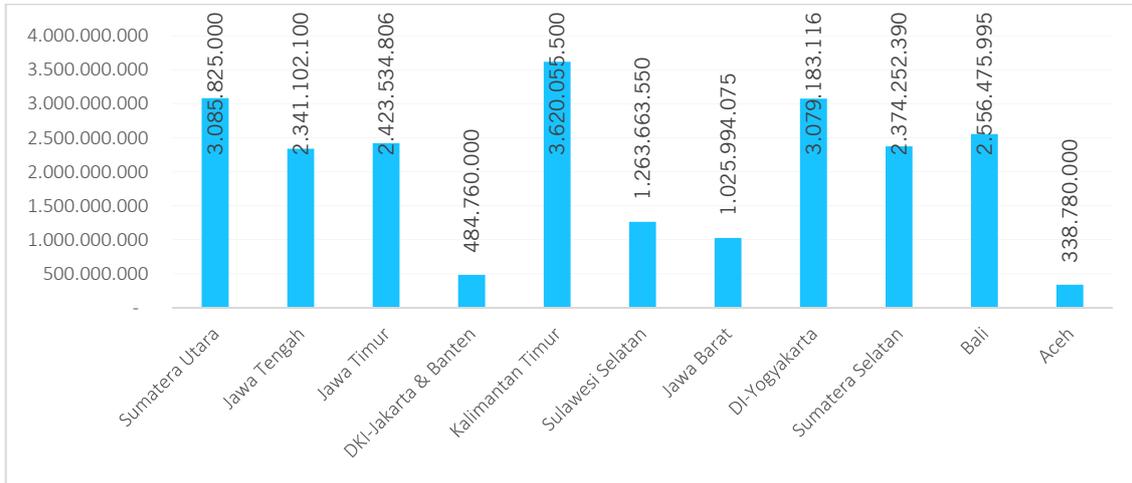
Ketika terjadi Pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *refocusing* anggaran dan kegiatan. Direktorat Pengembangan dan Usaha melakukan *refocusing* sehingga biaya kegiatan untuk mencapai target optimal PNBP oleh ketiga bidang tersebut menjadi Rp 6,1 milyar atau sebesar 4,6 persen dari target PNBP. Dengan demikian *share* nilai marketing terhadap pendapatan berkurang 1,0 persen. Pengurangan ini sesungguhnya merupakan efisiensi, karena targetnya tetap atau tidak berkurang. Dengan capaian (realisasi) sebesar Rp 204,9 milyar maka idealnya biaya marketing sebesar Rp 11,5 milyar atau 188,5 persen dari target hasil *refocusing* (Rp 6,1 milyar). Adapun *share market* yang dikontribusikan oleh masing-masing Stasiun TVRI daerah adalah sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 3.5 Capaian PNBP Stasiun Penyiaran Tahun 2020

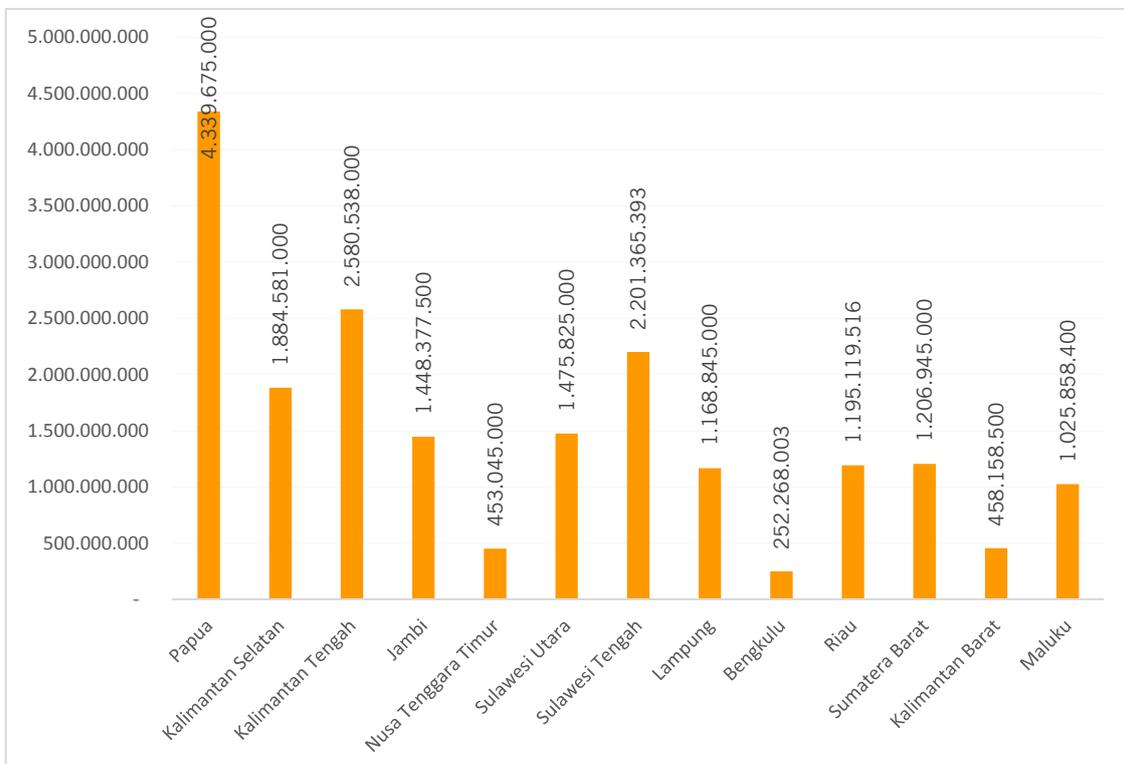


Dari kontribusi oleh masing-masing Stasiun TVRI daerah dapat juga dilihat kontribusi dari masing-masing kelas sebagaimana gambar dibawah ini.

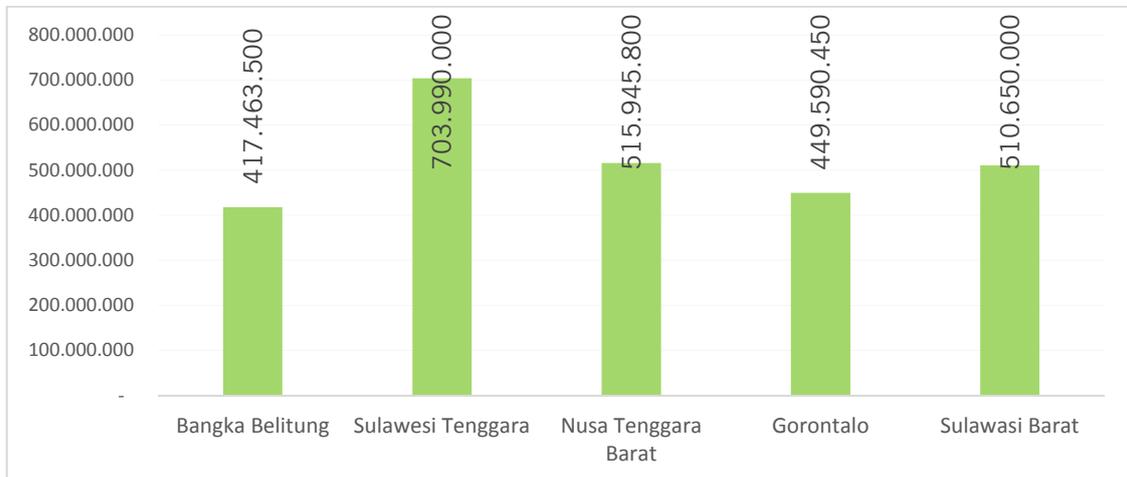
Gambar 3.6 Capaian PNPB Stasiun Penyiaran Tipe A Tahun 2020



Gambar 3.7 Capaian PNPB Stasiun Penyiaran Tipe B Tahun 2020



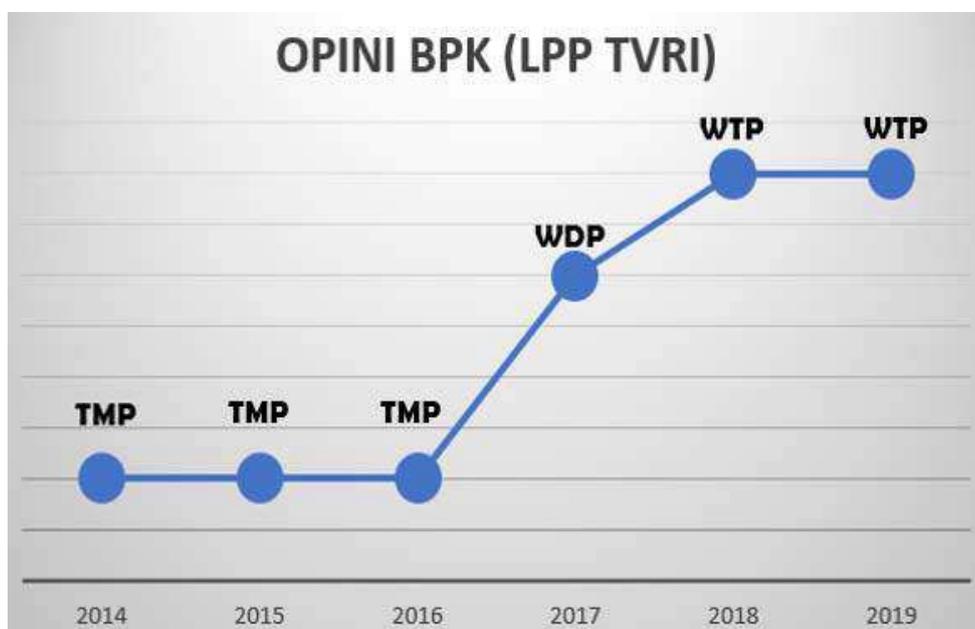
Gambar 3.8 Capaian PNBP Stasiun Penyiaran Tipe C Tahun 2020



## 6. Indikator Kinerja utama : Opini BPK atas Laporan Keuangan LPP TVRI

Untuk kedua kalinya Laporan Keuangan LPP TVRI pada bulan Juli 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2019, atau mencapai target yang telah ditetapkan, sebelumnya pada Tahun 2019 juga sudah mendapat Opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2018. Sebagai lembaga negara yang bergerak di bidang penyiaran, TVRI mampu meraih prestasi yang prestisius dengan meraih opini WTP. Sebelumnya selama 3 tahun berturut-turut pada Tahun 2014 s.d. 2016 Laporan Keuangan LPP TVRI memperoleh opini *disclaimer* (Tidak Memberikan Pendapat), kemudian meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun 2017, akhirnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018. Opini BPK atas Laporan Keuangan tertinggi (WTP) kepada LPP TVRI merupakan sebuah hasil perjuangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh karyawan baik di Pusat maupun di daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan khususnya. penataan aset dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan.

Gambar 3.9 Opini BPK untuk Tahun 2014-2019



Saat ini BPK sedang melaksanakan Audit Keuangan atas Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2020 yang baru akan selesai pada bulan Maret 2021, sehingga opini BPK atas Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2020 belum diketahui. Walaupun demikian seluruh jajaran LPP TVRI berusaha untuk tetap mempertahankan opini WTP yang sudah 2 kali diterima tersebut.

Pertimbangan atas target opini WTP pada LK tahun 2020:

1. Tindak Lanjut atas penyelesaian saldo Aset Lain-lain (Panjar Kerja Jasinonsi) yang terus dilaksanakan, sehingga telah mengurangi saldo pada neraca tahun 2020 secara signifikan.
2. Penyelesaian pembayaran atas tagihan kuitansi selama tahun 2020 yang semakin efektif & efisien, sehingga dapat menekan angka utang yang terbentuk pada neraca tahun 2020.
3. Pencapaian atas peningkatan realisasi PNBPN TVRI selama tahun 2020 yang sangat tinggi, jika dibandingkan dengan target anggaran.
4. Tindak Lanjut atas penyelesaian LHP BPK yang terus menerus dilaksanakan sehingga mengurangi temuan secara signifikan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian untuk mendapatkan opini BPK adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya Rekomendasi Hasil Audit BPK tahun tahun sebelumnya yang belum selesai Tindak Lanjutnya.
- b. Masih ada saldo saldo lama di Neraca yang belum tuntas, misalnya Saldo Aset Lain lain yang merupakan Saldo Panjar Uang Muka Kerja
- c. Kemampuan SDM penyusun Laporan Keuangan yang belum merata
- d. Neraca SAIBA masih menunggu kiriman data SIMAK sehingga memperlambat proses penyusunan Laporan Keuangan, misalnya data SIMAK Aset Tetap
- e. Akun-akun belum terregister

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian untuk mendapatkan opini BPK tersebut

- a. Membentuk *Task Force* Tindak Lanjut
- b. Reviu SPI untuk saldo saldo lama
- c. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan oleh Direktorat APK dan DJKN Kemenkeu RI.
- d. Untuk mengatasi keterlambatan penyusunan Laporan keuangan antara lain:
  1. Rekonsiliasi antara Neraca SAIBA dan SIMAK
  2. Merevisi anggaran jika pagu minus
- e. untuk penyelesaian Akun-akun belum terregister dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:
  1. Merevisi Akun sesuai dengan BASnya
  2. Memanfaatkan Surat Dispensasi dari DJA
  3. Melakukan Jurnal Koreksi dengan konsultasi terlebih dahulu kepada APK kemudian berdasarkan persetujuan APK maka dibuatkan Surat Permohonan koreksi kepada Direktur Keuangan

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

- a. Meningkatkan peran SPI dalam melakukan Reviu dan Tindak Lanjut BPK

- b. Untuk akun yang belum terregister akan dilakukan pemberitahuan kepada para *user* pada tiap-tiap unit kerja untuk memperbaiki akun pada Pengajuan DIPA Awal.

## **7. Indikator Kinerja utama : Indeks Reformasi Birokrasi**

Perkembangan dan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi LPP TVRI berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 atas perubahan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya upaya yang dilakukan oleh LPP TVRI dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pada tahun 2020 pelaksanaan Reformasi Birokrasi LPP TVRI dilanjutkan berdasarkan masukan pada evaluasi dan verifikasi lapangan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan rapat *desk review* percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020 di hotel Grand Kemang Jakarta, berikut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2020 yang menindaklanjuti dari evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP LPP TVRI pada tahun sebelumnya yang meliputi 8 area perubahan, yaitu :

Tabel 3.6 Hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi

NO	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI	AREA PERUBAHAN YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	INDIKTOR KEBERHASILAN	TARGET AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN
1	Kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan	Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan LHKPN	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	Meningkatkan kepatuhan LHKPN	Monitoring dan evaluasi kepatuhan LHKPN
2	Kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan		Meningkatnya kepatuhan LHKASN	Tingkat Kepatuhan LHKASN	100%	Meningkatkan kepatuhan LHKASN	1. Monitoring dan evaluasi kepatuhan LHKASN. 2. Sosialisasi LHKASN PBPNS
3	Kualitas Pengawasan Internal		Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal dengan SPIP	Level Maturitas SPIP	Level 3	Meningkatkan Penerapan SPIP	Monitoring dan evaluasi kapabilitas APIP
4	Kualitas APIP		Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal dengan APIP	Level kapabilitas APIP	Level 3	Meningkatkan kapabilitas SPI (APIP)	Monitoring dan evaluasi kapabilitas APIP
5	Kualitas tata kelola kearsipan	Tatalaksana	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Kategori Baik	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	1. Membentuk tim Satgas Pengelolaan Arsip 2. Kerjasama dengan ANRI 3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Arsip
6	Kualitas SPBE		Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Predikat Baik	Meningkatkan Implementasi SPBE	Monitoring & Evaluasi Implementasi SPBE
7	Kualitas PBJ		Meningkatnya kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Tingkat kematangan UKPBJ	Level Proaktif disetiap variabel	Meningkatkan PBJ	1. Peningkatan kompetensi SDM PBJ 2. Sertifikasi PBJ 3. Monitoring dan evaluasi kapabilitas UKPBJ
8	Kualitas Proses Bisnis		Meningkatnya kualitas proses bisnis	Persentase peta proses bisnis berbasis kinerja hingga level eselon IV	100%	Meningkatkan kualitas proses bisnis	1. Pemetaan Proses Bisnis 2. Reviu Efektivitas

							Proses Bisnis (SOP)
9	Kualitas Manajemen SDM	Manajemen SDM	Meningkatnya penerapan sistem merit	Indeks penerapan sistem merit	Kategori III (Baik)	Meningkatkan Manajemen SDM	Monitoring & Evaluasi Penerapan Sistem Merit
10	Kualitas Pelayanan Publik	Pelayan Publik	Terpenuhinya tindak lanjut atas seluruh rekomendasi dari Ombudsman	Persentase rekomendasi Ombudsman	100%	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Monitoring evaluasi pelayanan publik
11	Kualitas Pelayanan Publik		Meningkatnya kepatuhan tentang Standar Pelayanan Publik (UU no. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik)	Tingkat kepatuhan tentang standar pelayanan publik	Zona Hijau	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Monitoring evaluasi pelayanan publik
12	Kualitas pencapaian kinerja	Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya capaian kinerja K/L dalam lingkup strategis	Capaian kinerja K/L dalam lingkup Stranas (dari KPK)	100%	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Monitoring & Evaluasi Kinerja Stranas
13	Kualitas Perencanaan Kinerja Utama		Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja yang jelas dan selaras hingga level eselon IV dan/ atau setara	Kualitas perencanaan kinerja tingkat pusat hingga level eselon IV dan/atau setara	baik	Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja utama	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Utama
14	Kualitas Road Map RB	Manajemen Perubahan	Meningkatkan pelaksanaan RB di TVRI dengan membuat rencana aksi pada setiap area perubahan	Persentase rencana aksi yang dilaksanakan	100%	Meningkatkan kualitas Road Map RB	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
15	Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan LPP TVRI	Nilai AKIP dengan kategori "BAIK" (B ke atas)	Kategori BAIK (B ke atas)	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Monitoring & Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
16	Kualitas laporan keuangan	Pengawasan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	WTP	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas laporan keuangan
17	Rekomendasi LHE RB Tahun 2019	8 Area Perubahan	Meningkatkan pelaksanaan RB di TVRI dengan membuat rencana aksi pada setiap area perubahan	Persentase rekomendasi dari LHE RB yang selesai ditindaklanjuti	100%	Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi LHE RB 2019	1. Menyiapkan Action TL 2. Monitoring & Evaluasi tindak lanjut LHE RB tahun 2019
	Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang sudah dilakukan				Laporan Monev	Monitoring & Evaluasi rencana aksi	1. Rapat Monitoring & Evaluasi rencana aksi

				setiap 2 minggu sekali 2. Tindak lanjut monitoring rencana aksi
	Laporan tindak lanjut atas hasil pemetaan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh TVRI	Laporan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut hasil pemetaan peraturan perundang-undangan	1. Rapat intern berkala TL 2. Menyusun langkah kerja TL hasil pemetaan 3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka tindak lanjut hasil pemetaan
	Membuat cascade down kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah	Dokumen <i>cascade down</i> kinerja	Menyusun dokumen <i>cascade down</i> sampai pada level terendah	1. Rapat intern penyusunan <i>Cascade Down</i> kinerja 2. Menyusun draft dokumen <i>cascade down</i> kinerja 3. FGD Dokumen <i>Cascade Down</i> kinerja . 4. Finalisasi dokumen <i>cascade down</i> kinerja
	Reviu terhadap peta proses bisnis dan struktur organisasi dengan mengacu pada kinerja yang akan dicapai	Laporan hasil reviu	Reviu peta bisnis dan struktur organisasi	1. Rapat intern 2. Menyusun langkah kerja reviu 3. FGD 4. Finalisasi laporan reviu
	Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan	Laporan Monev	Meningkatkan implementasi gratifikasi dan benturan kepentingan	1. Monitoring berkala implementasi gratifikasi 2. Melakukan evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi 3. Monitoring tindak lanjut evaluasi penerapan penanganan benturan kepentingan

	Melakukan asesmen terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui gap kompetensi pegawai dan kemudahan membuat pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen hasil asesmen dan rencana pengembangan SDM/ pegawai		1. Inventarisasi data pegawai 2. Pelaksanaan asesmen pegawai
18	Persetujuan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KEMENPAN RB terhadap usulan Penyederhanaan Birokrasi	Dokumen persetujuan		1. Monitoring usulan 2. Pemenuhan kelengkapan administrasi
19	Persetujuan Deputi Bidang SDM Aparatur KEMENPAN RB terhadap usulan pengalihan Jabatan Struktural Eselon II dan IV ke Jabatan Fungsional	Dokumen persetujuan		1. Monitoring usulan 2. Pemenuhan kelengkapan administrasi

Adapun Implementasi dari program Reformasi Birokrasi di masing-masing 8 Area Perubahan LPP TVRI Tahun 2020 yang telah dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Manajemen Perubahan

Tujuan :

Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Aspek *Mandatory*:

- a. Tim Reformasi Birokrasi (RB), dibuktikan melalui pengukuhan Tim, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan dan monev tugas Tim.
- b. *Roadmap* RB, dibuktikan pada penyusunan (yang selaras antara *Roadmap* RB Pusat dan Rencana Kerja RB Unit), dan internalisasi *Roadmap*.
- c. Monitoring dan Evaluasi RB, dibuktikan pada penilaian mandiri dan monev rencana aksi RB.

- d. Budaya Kinerja, dibuktikan pada komitmen pimpinan dan agen perubahan serta media komunikasi reguler.

*Aspek Reform:*

- a. Komitmen Agen Perubahan, dibuktikan pada perubahan yang dihasilkan oleh Agen.
- b. Komitmen Pimpinan, dibuktikan pada pencapaian *Roadmap* RB Instansi dan Rencana Kerja RB Unit.
- c. Budaya Kinerja, dibuktikan pada internalisasi nilai-nilai organisasi dan penerapan standar prosedur tertentu dalam pekerjaan sehari-hari.

*Progress yang sudah dicapai:*

- a. Pembentukan Tim RB Pusat dan Stasiun Daerah Kerja
  - b. Penyusunan *Roadmap* RB 2020 – 2024
  - c. Penyusunan Rencana Kerja RB Unit 2020
  - d. Penilaian Mandiri RB Pusat dan Stasiun Daerah
  - e. Monev capaian *Roadmap* RB tahunan
  - f. Monev capaian Rencana Kerja RB Unit berkala
  - g. Pembentukan budaya kinerja yang ditujukan melalui pelibatan tanggungjawab Agen Perubahan dan komitmen Pimpinan pada *Quick Wins* utama:
    - Penyederhanaan birokrasi dengan penghapusan Eselon 3 dan 4;
    - Revisi PP 13 tentang Penyiaran Televisi Publik.
2. Deregulasi Kebijakan

Tujuan :

Menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat.

Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, kementerian/ lembaga/pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

*Aspek Mandatory:*

- a. Harmonisasi, dibuktikan melalui hasil identifikasi/analisa yang diikuti dengan langkah revisi/menghapus peraturan per-UU yang tidak sinkron/bersifat menghambat.
- b. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan per-UU, tersedianya sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan per-UU dan dilakukan evaluasi berkala dan perbaikan atas sistem tsb.

*Aspek Reform:*

- a. Peran Kebijakan, dibuktikan bahwa kebijakan yang ada memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang lain, serta memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan publik.
- b. Penyelesaian kebijakan, dibuktikan melalui penyelesaian jumlah kebijakan sesuai dengan Program Legislasi Nasional.

*Progress yang sudah dicapai:*

- a. Pemetaan/identifikasi/Analisa regulasi yang tidak sinkron/bersifat menghambat.
- b. Penyelesaian penyusunan, revisi/penghapusan regulasi.
- c. Peraturan mengenai restrukturisasi dan penyederhanaan birokrasi, dan Revisi PP 13 tentang Penyiaran Televisi Publik.
- d. Implementasi kebijakan sistem pengendalian penyusunan peraturan per-UU.
- e. Monev dan tindak lanjut perbaikan sistem pengendalian penyusunan peraturan per-UU.

### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Tujuan :

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi.

*Aspek Mandatory:*

- a. Penataan organisasi, dibuktikan melalui desain organisasi yang sesuai dengan Renstra, penyederhanaan struktur, mekanisme koordinasi JPT dengan kelompok jabatan fungsional dan pengalihan struktural ke fungsional, disusunya kelompok jabatan fungsional.
- b. Evaluasi kelembagaan, dibuktikan melalui hasil evaluasi pada ketepatan ukuran organisasi, jenjang organisasi, kemungkinan duplikasi, satuan organisasi, kemungkinan pejabat yang melapor pada lebih dari seorang atasan, kesesuaian tisi dengan sasaran kinerja dan *mandatory*, serta kemampuan adaptif organisasi.
- c. Tindak lanjut evaluasi, dibuktikan melalui pengusulan resrtukturisasi dan penyederhanaan birokrasi.

*Aspek Reform:*

- a. Organisasi berbasis kinerja, dibuktikan melalui efektifitas, efisiensi dan ketepatan ukuran organisasi sesuai dengan proses bisnis dan kinerja utama yang dihasilkan.
- b. Penyederhanaan birokrasi, dibuktikan melalui jumlah peta proses bisnis yang ideal dimiliki dalam menjalankan tisi.
- c. Hasil evaluasi kelembagaan, dibuktikan melalui hasil evaluasi kelembagaan pada peringkat komposit 5 (P5) skor 81-100 (PerMenPAN 20/2018 ttg Pedoman Evaluasi Kelembagaan).

*Progress yang sudah dicapai:*

- a. Usulan restrukturisasi organisasi
- b. Kebijakan penyederhanaan birokrasi (penghapusan Eselon 3 dan 4)
- c. Hasil Evaluasi kelembagaan, yang mencakup pada ketepatan ukuran organisasi, jenjang organisasi, kemungkinan duplikasi, satuan organisasi, kemungkinan pejabat yang melapor pada lebih dari seorang atasan, kesesuaian tisi dengan sasaran kinerja dan *mandatory*, serta kemampuan adaptif organisasi.

#### 4. Penataan Tatalaksana

Tujuan :

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/ lembaga/pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

*Aspek Mandatory:*

- a. Proses Bisnis dan SOP, dibuktikan melalui penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP yang sesuai dengan tugas dan fungsi, serta dilakukan evaluasi berkala dan perbaikan atas proses bisnis dan SOP.
- b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dibuktikan melalui ketersediaan arsitektur dan rencana kerja SPBE, serta pengimplementasian manajemen layanan SPBE, tersedianya berbagai layanan internal maupun layanan publik berbasis elektronik.
- c. Kebijakan Informasi Publik, dibuktikan melalui ketersediaan kebijakan KIP, serta monev berkala atas kebijakan tersebut.

*Aspek Reform:*

- a. Peta Proses Bisnis, dibuktikan peta proses bisnis yang disusun berpengaruh pada penyederhanaan jabatan.
- b. SPBE, dibuktikan melalui implementasi SPBE yang terintegrasi sehingga mendorong pelayanan internal dan pelayanan publik cepat dan efisien, serta peringkat indeks SBPE
- c. Transformasi digital, dibuktikan bahwa transformasi digital pada proses bisnis utama, bidang administrasi dan pelayanan publik telah mampu memberikan manfaat bagi organisasi.

*Progress yang sudah dicapai:*

- a. Revisi Peta Proses Bisnis sesuai struktur/tugas dan fungsi terbaru sesuai hasil *cascading*.
- b. Revisi SOP sesuai Proses Bisnis terbaru.
- c. Implementasi SPBE.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Tujuan :

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/ pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

*Aspek Mandatory:*

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai, sesuai anjab dan ABK.
- b. Proses penerimaan pegawai, yang transparan, akuntabel dan bebas KKN.
- c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, melalui tersedianya standar kompetensi jabatan, *assessment* pegawai, pengembangan kompetensi, serta monev kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- d. Promosi jabatan, dilakukan secara terbuka.
- e. Penetapan Kinerja Individu, tersedianya *cascading*, ukuran dan penilaian/monev kinerja individu berkala.
- f. Penegakan Kode Etik.
- g. Pelaksanaan evaluasi jabatan, sesuai dengan SKJ.
- h. Sistem Informasi Kepegawaian, yang dapat diakses dan dimutakhirkan.

*Aspek Reform:*

- a. Kinerja Individu, telah berorientasi *outcome* dan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja).
- b. Evaluasi jabatan, hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi disampaikan kepada Menteri
- c. *Assessment* pegawai, dijadikan dasar mutasi dan pengembangan karir.

- d. Kebutuhan pegawai, dijadikan dasar pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru.
- e. Penyetaraan jabatan, penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional telah dilakukan.

*Progress* yang sudah dicapai:

- a. Reviu Anjab (Analisa jabatan) dan ABK (Analisa Beban Kerja) sesuai kebutuhan dan strategi organisasi dalam Renstra.
- b. Pemutakhiran kebutuhan pegawai
- c. Kebijakan dan proses penerimaan pegawai yang akuntabel.
- d. Kebijakan dan proses promosi jabatan terbuka.
- e. *Cascading*, pengukuran, dan penilaian kinerja individu (dalam konteks penerapan *E Performance*)
- f. Implementasi penegakan disiplin pegawai dan monev tindak lanjutnya.
- g. Pemutakhiran aplikasi dan data SIMPEG.

## 6. Penguatan Akuntabilitas

Tujuan :

Menciptakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

*Aspek Mandatory:*

- a. Keterlibatan pimpinan, dalam penyusunan Renstra, penetapan kinerja, pemahaman target kinerja tahunan dan menengah, serta melakukan pemantauan berkala atas kinerja unit kerja.
- b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja, adanya upaya peningkatan SDM yang menjadi PIC SAKIP, tersedianya pedoman SAKIP, pemutakhiran data kinerja berkala.

*Aspek Reform:*

- a. Efektifitas dan efisiensi anggaran, dimana jumlah program/kegiatan mendukung pencapaian target kinerja utama.
- b. Pemanfaatan aplikasi akuntabilitas, tersedianya aplikasi yang dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran.

- c. Pemberian *reward* and *punishment*, dari hasil monev capaian kinerja.
- d. Kerangka logis kinerja, tersedianya peta strategis yang mengacu pada IKU dan menjadi dasar penentuan kinerja individu.

*Progress* yang sudah dicapai:

- a. Penetapan Renstra TVRI dan UKE-2.
- b. Revisi Lapkin/PK sesuai indikator dalam Renstra dan hasil *cascading*.
- c. Penyusunan Pedoman SAKIP.
- d. Penyempurnaan aplikasi *e-performance* yang didalamnya terintegrasi dengan anggaran program/kegiatan dan data kinerja.
- e. Monev kinerja unit secara berkala berbasis aplikasi *e-performance*.

## 7. Penguatan Pengawasan

Tujuan :

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Aspek *Mandatory*:

- a. Gratifikasi, telah diterapkan dan dimonev berkala.
- b. Penerapan SPIP, penerapan 5 unsur SPIP pada unit kerja.
- c. Pengaduan Masyarakat, telah ditangani dan dimonev berkala.
- d. *Whistle-Blowing System*, telah diterapkan dan dimonev berkala.
- e. Benturan Kepentingan, telah diterapkan dan dimonev berkala.
- f. Pembangunan Zona Integritas, terdapat unit menuju WBK/WBBM.
- g. APIP, adanya dukungan pimpinan, SDM dan anggaran yang memadai, fokus pada risiko dan *client*.

Aspek *Reform*:

- a. Penyampaian LKHPN dan LHKASN, hampir mencapai 100%.
- b. Mekanisme pengendalian, adanya mekanisme pengendalian berjenjang.
- c. Penanganan Pengaduan, seluruh pengaduan ditindaklanjuti.

- d. Pembangunan Zona Integritas, komitmen pembangunan ZI, jumlah unit WBK dan WBBM dalam setahun.
- e. Peran APIP, menjalankan fungsi konsultatif dan memberikan saran bagi peningkatan kinerja unit kerja.

*Progress* yang sudah dicapai:

- a. Implementasi gratifikasi.
- b. *Updating* Peta Risiko sesuai probis terbaru.
- c. Monev pelaksanaan SPIP berkala.
- d. Penanganan seluruh pengaduan masyarakat.
- e. PKPT berbasis Risiko.
- f. Peningkatan kualitas dan kapabilitas APIP dari Level 2 menjadi Level 3.
- g. Maturitas SPIP dari Level 2 menjadi Level 3.

#### 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/ lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

*Aspek Mandatory:*

- a. Standar pelayanan, dimaklumkan dan dimonev berkala
- b. Budaya pelayanan prima, peningkatan kemampuan pemberi layanan, pemberian penghargaan dan sanksi, adanya kompensasi, sarana layanan terintegrasi dan inovasi.
- c. Pengelolaan pengaduan, tersedia media pengaduan, tindak lanjut dan monev pengaduan layanan.
- d. Penilaian kepuasan, melalui survei dan hasilnya dipublikasikan.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi, penerapan dan perbaikan teknologi informasi secara terus-menerus.

*Aspek Reform:*

- a. Inovasi pelayanan, kualitas, kemudahan dan kejelasan sistem pelayanan.
- b. Perijinan, yang lebih cepat, singkat dan terintegrasi dengan aplikasi.

c. Penanganan Pengaduan, ditangani dengan responsif dan bertanggung jawab.

*Progress yang sudah dicapai:*

- a. Maklumat Standar Pelayanan.
- b. Peningkatan kompetensi SDM pelayanan.
- c. Kebijakan *reward and punishment* dan pemberian kompensasi pelayanan.
- d. Survei mandiri kepada mitra kerja.
- e. Pemutakhiran dan pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan publik (Aprina, dll).

Adapun Indeks Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LPP TVRI 2018-2020 adalah sebagaimana Tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.7 Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LPP TVRI 2018-2020

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2018	2019	2020
<b>A</b>	<b>KOMPONEN PENGUNGKIT</b>				
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,23	2,27	Proses di KEMENPAN RB
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,66	0,93	
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,32	2,34	
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,00	2,03	
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,15	10,22	
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,49	1,55	
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,64	3,72	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,64	3,65	
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>28,13</b>	<b>26,71</b>	
<b>B</b>	<b>KOMPONEN HASIL</b>				
1	Nilai Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	14,00	-	3,91	
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,07	2,36	
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,21	5,72	
4	Opini BPK	3,00	2,00	3,00	
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,52	8,73	
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>20,80</b>	<b>23,72</b>	
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100,00</b>	<b>48,93</b>	<b>50,43</b>	

## 8. Indikator Kinerja utama : Nilai SAKIP

Pada tahun 2020 hasil capaian nilai SAKIP LPP TVRI masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga LPP TVRI belum dapat menjelaskan hasil penilaian untuk Tahun 2020. Namun pada tabel dibawah ini program pencapaian nilai SAKIP LPP TVRI dari tahun 2018 baru mencapai nilai SAKIP sebesar 50,13 sedangkan tahun 2019 sudah mencapai nilai SAKIP sebesar 51,34. Artinya progress penilaian SAKIP LPP TVRI sebelum tahun 2020 adalah CC dan belum mendapatkan nilai standar B. Untuk itu diharapkan hasil penilaian tahun 2020 bisa mendapatkan nilai B.

Tabel 3.8 Indeks Hasil Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2018	2019	2020
A	Perencanaan Kinerja	30	16,76	16,80	Proses di KEMENPAN RB
B	Pengukuran Kinerja	25	9,85	9,85	
C	Pelaporan Kinerja	15	8,24	8,24	
D	Evaluasi Internal	10	4,28	4,28	
E	Capaian Kinerja	20	11,00	12,17	
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>50,13</b>	<b>51,34</b>	
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>	

## 9. Indikator Kinerja utama : Peningkatan PNBPNBP

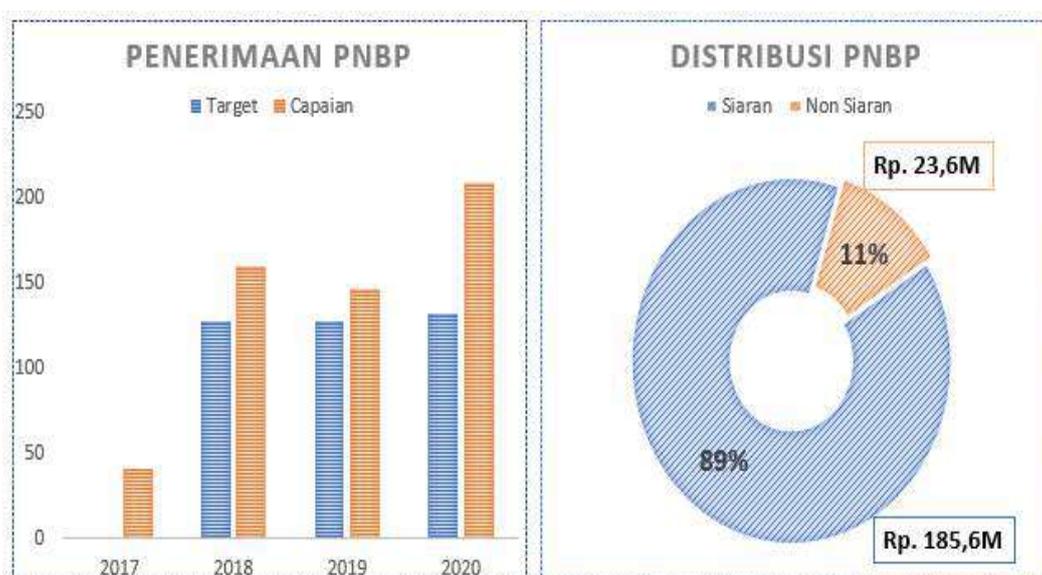
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPNBP, LPP TVRI sebagai instansi pengelola PNBPNBP wajib untuk melakukan pengelolaan PNBPNBP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan PNBPNBP. Dalam pengelolaan PNBPNBP LPP TVRI juga berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif atas PNBPNBP yang berlaku pada LPP TVRI yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 dan turunan peraturan berupa Peraturan Direksi Nomor 03/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 tentang

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP sampai dengan Rp.0 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang berlaku pada LPP TVRI.

Sesuai dengan misi LPP TVRI yaitu mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern, serta terukur kemanfaatan maka merupakan komitmen dari Direksi LPP TVRI untuk selalu meningkatkan tata kelola PNBP sehingga diharapkan dapat terus meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* internal maupun eksternal.

Pada laporan keuangan LPP TVRI tahun 2020, dicatatkan penerimaan PNBP Fungsional tahun 2020 sebesar Rp. 209.186.011.226,- (209,2 M) yaitu 158% dari target kinerja tahun 2020.

Gambar 3.8 Penerimaan PNBP dan Distribusi PNBP



### Trend Penerimaan PNB

Tahun	Penerimaan (Rp.)
2017	41.189.356.583
2018	159.490.927.273
2019	146.200.345.329
2020	209.186.011.226

Dari tabel tren penerimaan, capaian PNB berada diatas dari target yang ditentukan, kontribusi tersebar adalah penerimaan PNB Siaran.

Pengelolaan PNB yang dilaksanakan oleh Direktorat Keuangan, LPP TVRI adalah terdiri dari :

1. Perencanaan anggaran PNB
2. Pengelolaan dalam penagihan dan penatausahaan penerimaan
3. Pengelolaan piutang
4. Pelaporan penerimaan

Selanjutnya ada beberapa kegiatan yang kami lakukan untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran utama terkait penerimaan PNB diantaranya :

1. Meningkatkan komunikasi antara pengelola PNB pusat dan daerah dengan WA Group.
2. Melaksanakan rapat rekonsiliasi data antara *stakeholder* internal setiap bulan.
3. Mengevaluasi POS terkait penerimaan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan penerimaan.
4. Meningkatkan pengendalian internal dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi penerimaan dalam kegiatan pengelolaan penerimaan dan piutang.
5. Melaksanakan inisiasi integrasi aplikasi penerimaan (*Aprina*) dan *Billing* Simponi (Kemenkeu).
6. Penyelesaian temuan BPK terkait penerimaan PNB.
7. Peningkatan kapabilitas pengelola PNB dengan sosialisasi dan bimtek *via daring*.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya

- a. Terkendalanya kegiatan sosialisasi, bimtek dan rekonsiliasi pengelola PNBK karena pandemi covid.
- b. Terkendalanya kegiatan pengiriman dokumen penerimaan (*Invoice* dan kuitansi) dikarenakan skema kerja WFH-WFO.
- c. Keterlambatan pembayaran oleh mitra kerjasama karena pandemi covid yang menyebabkan piutang kerjasama dan denda.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

- a. Sosialisasi dan Bimtek menggunakan sistem *daring* (*Zoom* dan *WAG*).
- b. Membuat peraturan internal terkait kelonggaran pembayaran karena pandemi covid.
- c. Melakukan inisiasi kerjasama dengan BSRE (Badan Sertifikat Elektronik) untuk implementasi *digital signature*.
- d. Melakukan inisiasi kerjasama dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu untuk integrasi Aprina dan Simponi.
- e. Melakukan koordinasi lebih intensip kepada *Stakeholder External* (Mitra) untuk mengurangi terjadinya keterlambatan pembayaran dan denda.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah sebagai berikut

- a. Melanjutkan proses implementasi *digital signature*.
- b. Melanjutkan proses integrasi Aprina dan Simponi.
- c. Melanjutkan sosialisasi dan bimtek *via daring*.
- d. Evaluasi POS penerimaan dan piutang secara berkala.

### **3.3 Realisasi anggaran LPP TVRI Tahun 2020**

Sebagaimana pagu alokasi LPP TVRI tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam dokumen penganggaran (DIPA) dalam pelaksanaannya telah terealisasi hampir sebesar rata-rata diatas 93%. Adapun penjelasan capaian realiasi anggaran TVRI adalah sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 3.9. Realisasi APBN LPP TVRI Per Satker (*Netto*)  
Per 31 Desember 2020

No.	Kode Satker	TVRI Stasiun	PAGU	REVISI PAGU	REALISASI SD BULAN INI	SISA	% REALISASI
1	700200	KANTOR PUSAT TVRI	588.248.196.000	570.279.724.000	525.449.618.218	44.830.105.782	92,14%
2	700210	TVRI STASIUN BALI	21.203.175.000	29.517.529.000	28.623.047.894	894.481.106	96,97%
3	700211	TVRI STASIUN BENGKULU	11.956.268.000	15.293.759.000	13.829.272.735	1.464.486.265	90,42%
4	700212	TVRI STASIUN D.I. ACEH	21.071.320.000	31.616.295.000	30.282.947.947	1.333.347.053	95,78%
5	700213	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	27.762.591.000	38.311.743.000	36.492.720.864	1.819.022.136	95,25%
6	700214	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	15.771.986.000	23.678.485.000	22.804.611.192	873.873.808	96,31%
7	700215	TVRI STASIUN GORONTALO	10.515.845.000	14.775.321.000	14.333.326.504	441.994.496	97,01%
8	700216	TVRI STASIUN JAMBI	13.033.287.000	16.169.989.000	15.141.886.117	1.028.102.883	93,64%
9	700217	TVRI STASIUN JAWA BARAT	26.767.854.000	36.882.297.000	36.259.199.715	623.097.285	98,31%
10	700218	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	28.147.930.000	37.804.872.000	37.008.524.125	796.347.875	97,89%
11	700219	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	33.552.420.000	43.178.476.000	42.647.622.080	530.853.920	98,77%
12	700220	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	13.621.779.000	18.648.031.000	17.880.573.401	767.457.599	95,88%
13	700221	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	14.177.644.000	19.365.800.000	18.835.452.587	530.347.413	97,26%
14	700222	TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH	15.176.629.000	19.971.429.000	18.422.001.341	1.549.427.659	92,24%
15	700223	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	21.129.806.000	28.720.007.000	26.604.315.965	2.115.691.035	92,63%
16	700224	TVRI STASIUN LAMPUNG	14.908.353.000	20.535.207.000	19.689.583.970	845.623.030	95,88%
17	700225	TVRI STASIUN MALUKU	16.091.425.000	24.386.886.000	23.370.176.119	1.016.709.881	95,83%
18	700226	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT	10.684.370.000	14.909.630.000	13.794.121.159	1.115.508.841	92,52%
19	700227	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR	15.631.739.000	21.357.112.000	20.606.734.976	750.377.024	96,49%
20	700228	TVRI STASIUN PAPUA	17.717.103.000	21.241.660.000	19.118.096.987	2.123.563.013	90,00%
21	700229	TVRI STASIUN RIAU	14.283.435.000	18.447.629.000	17.617.956.794	829.672.206	95,50%
22	700230	TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN	25.076.201.000	35.941.170.000	34.870.174.675	1.070.995.325	97,02%
23	700231	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH	15.174.041.000	21.072.102.000	19.616.216.113	1.455.885.887	93,09%
24	700232	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA	13.304.815.000	19.922.100.000	17.770.507.074	2.151.592.926	89,20%
25	700233	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	16.039.727.000	21.603.673.000	20.533.593.285	1.070.079.715	95,05%
26	700234	TVRI STASIUN SUMATERA BARAT	16.772.678.000	24.522.816.000	22.283.554.298	2.239.261.702	90,87%
27	700235	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	23.195.173.000	32.560.279.000	30.490.402.681	2.069.876.319	93,64%
28	700236	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	25.922.068.000	36.371.037.000	32.248.549.443	4.122.487.557	88,67%
29	700237	LPP TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	8.791.655.000	12.547.131.000	11.882.869.302	664.261.698	94,71%
30	700238	LPP TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	12.222.573.000	14.752.953.000	13.080.120.045	1.672.832.955	88,66%
		Total	1.107.952.086.000	1.284.385.142.000	1.201.587.777.606	82.797.364.394	93,55%

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2020 adalah laporan tahun pertama dari Renstra periode 2020-2024 dan merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di LPP TVRI termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2019. Dalam rencana kinerja tahun 2020 ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (indikator) indikator kinerja untuk bisnis utama.

Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan capaian masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama adalah Meningkatnya kualitas produksi dan siaran televisi dengan 5 (lima) Indikator kinerja utama di tingkat Lembaga yaitu: indikator
  1. *Audience Share*
  2. Indeks Survei Eksternal
  3. *Audience share* lokal
  4. *Coverage Area*
  5. *Coverage Population*

Dari 5 (lima) Indikator tersebut, indicator 3, 4 dan 5 telah mencapai realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan sedangkan indikator 1 dan 2 capaian realisasinya masih jauh sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran strategis kedua adalah Meningkatnya kualitas manajemen internal dengan 5 (lima) indikator kinerja utama di tingkat Lembaga yaitu indikator
  1. Opini BPK
  2. Nilai Reformasi Birokrasi
  3. Indeks Akuntabilitas Kinerja
  4. Peningkatan PNBK (Rp)

Dari 4 (empat) Indikator tersebut, indikator 1 dan 4 telah tercapai realisasi sesuai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan indikator 2 dan 3 capaian realisasinya masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari hasil capaian kinerja tahun 2020 tersebut, maka LPP TVRI diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang agar dapat terwujud menjadi Televisi Republik Indonesia yang terintegrasi di seluruh Indonesia serta lebih modern di masa yang akan datang sebagai tantangan terhadap perkembangan teknologi, informasi dan komputer (TIK) serta perubahan demokrasi di Indonesia.